

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS LAPORAN ARUS KAS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2014-2018**



**Oleh:**

**IMERDA NINGSIH  
NPM : 160412022**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2020**

**ANALISIS LAPORAN ARUS KAS PADA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TAHUN ANGGARAN 2014-2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai untuk memenuhi syarat persyaratan  
meperoleh gelar sarjana akuntansi**



**Oleh:**

**IMERDA NINGSIH  
NPM : 160412022**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS LAPORAN ARUS KAS PADA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TAHUN ANGGARAN 2014-2018**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**IMERDA NINGSIH  
NPM. 160412022**

**telah diperiksa dan setuju untuk diuji  
di hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi**

Teluk Kuantan,

**PEMBIMBING I**



**Zul Ammar, SE., ME  
NIDN. 102008841**

**PEMBIMBING II**



**Yul Emri Yulis, SE., M.Si  
NIDN. 1014038901**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



**Yul Emri, SE., M.Si  
NIDN. 1014038901**

**LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**ANALISIS LAPORAN ARUS KAS PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2014-2018**

Disusun dan diajukan oleh:

**IMERDA NINGSIH  
160412022**

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi  
pada tanggal 19 Oktober 2020  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,  
Dewan Sidang Skripsi

No	Nama dosen	Jabatan	Tanda tangan
1	M. Irwan, SE.,MM	Ketua	1. 
2	Dessy Kumala Dewi, SE.,M.Ak	Sekretaris	2. 
3	Zul Ammar, SE.,ME	Anggota 1	3. 
4	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Anggota 2	4. 
5	Rina Andriani, SE.,M.Si	Anggota 3	5. 
6	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Anggota 4	6. 

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial



**ZUL AMMAR, SE., ME**  
NIDN. 1020088401

Ketua  
Program Studi Akuntansi



**YUL EMRI YULIS, SE.,M.Si**  
NIDN. 1014038901

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Imerda Ningsih

NPM : 160412022

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **ANALISIS LAPORAN ARUS KAS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2014-2018**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 2 ayat 2 dan Pasa 70).

Teluk Kuantan, oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



**Imerda Ningsih  
160412022**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur bagi *Allah Subhanahu Wata'ala* atas segala nikmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita *Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam*, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan sampai kepada kita semua. Atas nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2014-2018”.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran masih sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran, dan fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kesungguhan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis., MM.** Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi dan Penasehat Akademis peneliti yang telah memberi arahan dan semangat selama perkuliahan.
2. Bapak **Zul Ammar, SE., ME** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas

Islam Kuantan Singingi sekaligus Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, dorongan dan semangat serta saran-saran untuk penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak **Yul Emri Yulis, SE., M.S,i** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus Pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk mulai dari membuat skripsi hingga rampungnya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Akuntansi dan Staf Fakultas Ilmu Sosial yang telah banyak membantu dan telah banyak memberi bekal ilmu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti selama belajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Bapak dan Ibu yang berada pada seluruh BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi sebagai responden, yang telah meluangkan waktu membantu peneliti melengkapi data- data yang dibutuhkan dalam penyelesaian Skripsi.
6. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Islam Kuantan Singingi;
7. Teristimewah untuk keluarga yaitu Orang tua tercinta Ayahanda **Syafri** dan Ibunda **Idah**. Kakak Penulis **Fitri Endang.SP, Misrigon, Dasilawati, Musdir** dan Adik penulis **Joko Purnomo** yang selama ini telah memberikan nasihat, doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak akan tergantikan oleh apapun.
8. Sahabat Penulis **Dianita Batami, SE** dan **Mardaweli, S.Ak** yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta memberikan dukungan dan saran-saran untuk penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-satu dan orang terdekat, yang selalu memberikan saran dan selalu memberikan dukungan kepada penulis, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Besar harapan bagi penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Teluk Kuantan, 28 September 2020

Penulis,



**IMERDA NINGSIH**  
**160412022**



## ABSTRAK

### ANALISIS LAPORAN ARUS KAS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2014-2018

**Imerda Ningsih  
Zul Ammar  
Yul Emri Yulis**

Latar belakang Penelitian ini adalah Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2014-2018. Laporan Arus Kas kas Pemerintah Kabupaten Kuantan singingi dari tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dan penurunan kas hal ini mengindikasikan ketidak stabilan kinerja keuangan pemerintah daerah dan perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pengelolaan keuangan tahun berikutnya. Dan juga masih terdapat kendala dalam penyusunan laporan arus kas, lebih pada lambatnya OPD dalam menyampaikan Laporan keuangan OPD sehingga proses konsolidasi untuk penyusunan laporan arus kas juga menjadi terlambat.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui hasil analisis Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2014-2018. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder data yang secara langsung diambil dari BPKAD. Hasil penelitian penulis dapat dilihat bahwa pertumbuhan Arus kas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2018, jika dilihat dari aktivitas operasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Singingi adalah baik, sedangkan arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pembiayaan menunjukkan kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kurang baik. Dari aktivitas pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengalami defisit yang besar jumlahnya sehingga memaksa digunakan sumber pembiayaan internal maupun eksternal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kurang baik. Dari analisa arus Kas bebas didapat hasil selama tahun 2014-2018 bersaldo positif, ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah baik meskipun mengalami penurunan di tahun 2015, tetapi secara keseluruhan arus kas bebas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengalami kenaikan.

**Kata Kunci: Laporan Arus Kas, Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Dari Aktivitas Inventasi Arus Kas Dari Aktivias Pembiayaan, Arus Kas Bebas.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF CASH FLOW STATEMENTS IN THE LOCAL GOVERNMENT OF KUNTAN SINGINGI REGENCY, 2014-2018.**

**Imerda Ningsih  
Zul Ammar  
Yul Emri Yulis**

*The background of this research is the Cash Flow Report of the Kuantan Singingi Regency Government for the 2014-2018 Fiscal Year. The cash flow statement of the Kuantan Singi Regency Government from 2014-2018 experienced an increase and decrease in cash, this indicated the instability of the regional government's financial performance and needed to be the government's attention in financial management for the following year. And there are still obstacles in the preparation of cash flow reports, the delay in OPD in submitting OPD financial reports so that the consolidation process for preparing cash flow reports is also delayed.*

*The research objective was to determine the results of the analysis of the local government cash flow statements of Kuantan Singingi Regency for the 2014-2018 fiscal year. This type of research conducted by researchers is descriptive qualitative research. The type of data used by researchers is secondary data, which is directly taken from BPKAD. The results of the author's research can be seen that the cash flow growth of the Kuantan Singingi Regency Government in 2014-2018, when viewed from the operating activities, the financial performance of the Singingi Regency Government is good, while the cash flow from investing activities and cash flow from financing activities shows the financial performance of the Kuantan Regency Government. Singingi is not good. From the financing activities, the Government of Kuantan Singingi Regency has experienced a large deficit so that it forces the use of internal and external sources of financing. This indicates that the financial performance of the Kuantan Singingi Regency Government is not good. From the free cash flow analysis, the results obtained during 2014-2018 have a positive balance, this shows that the performance of the Kuantan Singingi Regency government is good even though it has decreased in 2015, but overall the free cash flow of the Kuantan Singingi Regency Government has increased.*

**Keyword: cash Flow Statement, cash flow from oprating activiies, cash flow from financing, free cash flow.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTARTABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi.....	10
2.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi.....	11
2.1.3 Pengertian Keuangan Sektor Publik .....	12
2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	14
2.1.5 Tujuan Laporan Keuangan .....	17
2.1.6 Komponen Laporan Keuangan Daerah.....	18
2.1.7 Laporan Arus Kas.....	20
2.1.8 Analisis Laporan Arus Kas.....	29
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Pemikiran .....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian.....	39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	39
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian .....	40
3.3.1 Populasi Penelitian .....	40
3.3.2 Sampel Penelitian.....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	41
3.4.1 Jenis Data .....	41
3.4.2 Sumber Data .....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Analisis Data.....	42

3.6.1	Analisis Pertumbuhan Arus Kas.....	42
a	Analisis Arus Kas dari Aktivitas Operasi .....	43
b	Analisis Arus Kas dari Aktivitas Investasi NonKeuangan ...	44
c	Analisis Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan .....	45
3.6.2	Analisis Arus Kas Bebas.....	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	45
4.2	Hasil Penelitian .....	73
4.3	Pembahasan .....	84
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	90
5.2	Saran .....	91
DAFTAR PUSTAKA	.....	93

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1	Laporan Arus Kas Bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ..... 6
2.1	Contoh Format umum Laporan Arus Kas (Metode Langsung)..... 26
2.2	Contoh Format umum Laporan Arus Kas (Metode Langsung)..... 28
2.3	Analisis Pertumbuhan Arus Kas ..... 30
2.4	Kesimpulan Hasil Penelitian Terdahulu ..... 33
3.1	Jadwal Penelitian ..... 43
3.3	Analisis Arus Kas Aktivitas Operasi..... 44
3.3	Analisis Arus Kas Aktivitas investasi Nonkeuangan..... 44
3.4	Analisis Arus Kas Aktivitas Pembiayaan..... 45
4.1	Daftar Bupati yang memimpin Kabupaten Kuantan Singingi..... 47
4.2	Nama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kuantan Kuantan singingi..... 49
4.3	Laporan Arus Kas Bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantana Singingi Tahun Anggaran 2014-2018 ..... 75
4.4	Pertumbuhan Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2014-2018 ..... 78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran .....	38
2.2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi .....	54
2.3 Grafik Pertumbuhan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi .	82

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Data Laporan Arus Kas
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat pernyataan telah melakukan riset
4. Biodata

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat di dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance and Clean Government*), karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legimate* agar penyelenggara pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Fungsi pemerintahan tersebut akan terselenggara dengan baik apabila terwujudnya *Good Governance*.

Salah satu pilar *good governance* adalah akuntabilitas sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah direncanakan secara publik periodik. Ini berarti bahwa akuntabilitas juga merupakan instrumen kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pelayanan publik. Dalam hal ini, diperlukan review dan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai



semua itu. Pengendalian (control) sebagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya. Kinerja keuangan merupakan hasil yang dicapai pemerintahan atas berbagai aktivitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber keuangan yang tersedia, penilaian kinerja keuangan suatu pemerintahan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi terhadap para penyandang dana dan juga untuk mendapat tujuan yang telah ditetapkan pemerintahan. Cara untuk mengetahui baik buruknya kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dapat diketahui dengan cara menganalisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan.

Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2011, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam keputusan. Sedangkan laporan keuangan sektor publik termasuk dalamnya laporan keuangan pemerintah adalah representasi posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik yang tujuannya memberikan informasi keuangan entitas tersebut Bastian (2006 : 10)

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka menciptakan *good governance*. Laporan

keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, Mahmudi (2016:13). Adapun komponen-komponen laporan keuangan pemerintah adalah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi lagi dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (selanjutnya disebut PP Nomor 71 Tahun 2010) yang ditetapkan 22 Oktober 2010.

Fenomena laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena masih banyak ditemukannya penyimpangan- penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Pemerintah. Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) semester I tahun 2018 yang diungkapkan oleh badan pemeriksaan keuangan ditemukan hasil pemantauan pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat kerugian daerah sebesar Rp.2,19 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri angsuran sebesar Rp. 213,09 miliar (9%), pelunasan sebesar Rp. 808,14 miliar (37%), dan penghapusan sebesar Rp. 1,14 miliar (1%). Sisa kerugian ada pemerintah daerah sebesar Rp. 1,16 triliun (53%) ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Temuan kerugian pemerintah daerah dalam hasil pemeriksaan ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2012- 2017 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi**

<b>No.</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>ket</b>
1	2012	Wajar Tanpa Pengecualian	-
2	2013	Wajar Tanpa Pengecualian	-
3	2014	Wajar Tanpa Pengecualian	-
4	2015	Wajar Tanpa Pengecualian	-
5	2016	Wajar Tanpa Pengecualian	-
6	2017	Wajar Tanpa Pengecualian	-
7	2018	Wajar Tanpa Pengecualian	-

*Sumber: pekanbaru.bpk.co.id tahun 2019*

Meskipun dalam kurun waktu 7 tahun terakhir Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan, namun masih ada kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih banyak kendala, permasalahan

yang ditemui di laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan belum terealisasi dengan baik.

Laporan Arus Kas sebagai salah satu Komponen dari LKPD sangat bermanfaat bagi pengguna keuangan pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran tentang mutasi kas akibat dari aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah. Bagaimana pengaruh masing-masing kategori aktivitas pemerintah daerah yaitu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggran terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Pembaca laporan keuangan melalui informasi dalam Laporan Arus Kas dapat menilai kinerja finansial pemerintah selama periode tersebut dan dapat menggunakannya untuk memprediksi kondisi keuangan di masa mendatang. Laporan Arus Kas tersebut merupakan penghubung mata rantai dari rekening riil yang dicerminkan dalam Neraca dan rekening nominal dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Arifin (2015), bagi pengguna eksternal Laporan Arus Kas ini memberikan informasi yang lebih bermakna bila dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Karena Laporan Arus Kas menunjukkan hasil kondisi objektif kas dan perubahan perubahannya. Laporan Arus Kas menginformasikan mengenai perjalanan kas selama periode yaitu dari saldo awal kas hingga saldo akhirnya. Sementara neraca hanyalah merupakan potret posisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal laporan saja, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran lebih melengkapi informasi dan Laporan Arus Kas agar lebih membantu bagi pengguna laporan dalam memahami dan menilai kinerja keuangan pemerintah daerah serta pembuatan keputusan maka diperlukan Laporan Arus Kas.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai organisasi sektor publik, setiap akhir tahunnya menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Dari komponen Laporan Keuangan tersebut selama ini Pemerintah Daerah dalam analisa dan pembahasan laporan keuangan lebih fokus kepada Laporan Realisasi Anggaran, sementara komponen Laporan keuangan yang lain termasuk Laporan Arus Kas cenderung dianggap sebagai laporan keuangan yang kurang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah. Sehingga kinerja pemerintah daerah selama ini selalu diukur berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran saja.

Berikut data Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Laporan Arus Kas Bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 dan 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Arus Kas bersih Dari Aktivitas Operasi (Rp)	385.548.379.856,65	67.697.801.825,42	116.755.934.874,56	183.219.662.461,22	231.719.121.711,83
2	Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp)	(358.433.993.474,00)	(326.735.746.648,00)	(178.016.363.176,00)	(192.079.416.609,05)	(196.801.381,60)
3	Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan (Rp)	93.479.000,00	34.932.000,00	188.412.000,00	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	1.319.645.402,00	1.774.319.987,00	(5.205.439.876,00)	(6.535.166.737,60)	4.749.572.622,60
5	Kenaikan/ penurunan Kas (Rp)	28.527.510.784,65	(257.228.692.835,58)	(66.277.456.177,44)	(15.394.920.885,43)	39.666.838.952,83
6	Saldo awal (Rp)	326.387.886.395,10	353.473.854.347,75	96.245.161.512,17	31.328.682.693,73	16.572.974.004,90
7	Saldo akhir (Rp)	355.994.870.614,23	99.753.430.144,17	33938.669.752,63	21.275.145.396,50	21.275143.396,50

*Sumber: BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi, 2019*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi pada tahun 2014 Rp.385.548.379.856,65, pada tahun 2015 Rp.67.697.801,42, pada tahun 2016 Rp.116.755.934.874,56 dan pada tahun 2017 Rp.183.219.662.461,22 dan 2018 Rp. 231.719.121.711,8. dan bersaldo positif dan mengalami kenaikan disetiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015 arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ini menunjukkan adanya kesehatan keuangan yang baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, meskipun mengalami penurunan ditahun 2015 tetapi secara keseluruhan mengalami kenaikansetiap tahunnya. Pada Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.(358.433.993.474,00), pada tahun 2015 sebesar (326.735.746.648,00) dan tahun 2016 (178.016.363.176,00) dan tahun 2017 Rp. (192.079.416.609,05) dan tahun 2018 Rp. (196.801.381,60) bersaldo negatif menunjukkan adanya pengeluaran kas untuk belanja modal yang besar dibanding penerimaan kas dari penjualan aset tetap. Dilihat dari arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2014 sebesar Rp.93.479.000,00, pada tahun 2015 Rp.34.932.000,00 dan tahun 2016 Rp. 188.412.000,00 Tahun 2017 dan tahun 2018 Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan adalah nol, secara keseluruhan bersaldo positif ini mengindikasikan adanya masalah keuangan di Pemerintah Kabupaten kuantan Singingi. Dan jika dilihat dari kenaikan/penurunan kas, selama tahun 2014 sampai tahun 2018 terjadi mengalami kenaikan dan penurunan kas hal ini mengindikasikan ketidak stabilan kinerja keuangan Pemerintah Kabupten Kuantan Singinngi dan ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan keuangan tahun berikutnya. Dan Hal lain dalam laporan Arus kas pemerintah daerah juga

terdapat kendala dalam menyusun Laporan Arus Kas lebih pada lambatnya OPD dalam menyampaikan laporan keuangan OPD sehingga proses konsolidasi untuk penyusunan laporan Arus kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi juga menjadi terlambat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas sangatlah penting, dengan adanya laporan arus kas, pemerintah daerah dapat mengetahui arus kas masuk arus keluar dan kemampuan mengelola keuangannya serta masyarakat dapat menilai bahwa uang yang telah dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar dan jelas.

Berdasarkan uraian fakta diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis melalui penelitian dengan Judul **“Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2014 – 2018”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah pada peneltian ini adalah bagaimana Analisis Laporan Arus Kas pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2014- 2018?.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis Laporan arus Kas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2014-2018.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dari segi ilmiah, diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Pihak Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan pada penulis, khususnya dibidang Keuangan yang menganalisis laporan arus kas dalam menilai kinerja keuangan
2. Pihak Akademis, sebagai sumber-sumber informasi, inspirasi, dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik- topik yang berkaitan, bahan pertimbangan atau bahan masukan dalam menilai kinerja keuangan sebagai melakukan analisis lapora arus kas untuk peningkatan efektivitas kinerja
3. Pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan referensi maupun bahan kajian dalam melakukan analisis laporan arus kas selanjutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah seni dari pada pencatatan, penggolongan dan peringkasan dari pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian dan setidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang secepat-cepatnya dan petunjuk atau dinyatakan dengan uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul padanya.

Menurut Harahap (2011:5) akuntansi adalah proses mengidentifikasikn, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil keputusan oleh para pemakainya. Akuntansi adalah bahasa atau alat untuk komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa poisi keuangan teruama dalam jumlah kekayaan, utang dan modal dari suatu bisnis.

Secara umum, Akuntansi adalah sebuah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta dalam kejadian yang berhubungan dengan keuangan yang sehingga bisa digunakan oleh orang yang menggunakan dengan mudah dimengerti dalam pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Dalam skala besar akuntansi sangat bermanfaat sebab bisa menunjukkan status dan keadaan dari keuangan perusahaan, memperoleh gambaran dari tingkat laba perusahaan, dasar penentuan pajak serta peraturan perusahaan.

Adapun manfaat akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai informasi keuangan pihak untuk yang membutuhkan
2. Sebagai bahan evaluasi keuangan
3. Sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Membantu pencatatan ekonomi keluarga.

### **2.1.2 Bidang- Bidang Akuntansi**

Berikut berbagai macam bidang- bidang akuntansi

#### **1. Akuntansi keuangan (*Financial Accounting*)**

Adalah bidang akuntansi yang memiliki kegiatan seperti mencatat semua kegiatan financial yang berkaitan dengan akuntansi atau yang sudah dikhususkan untuk memproses pencatatan ekonomi secara keseluruhan seperti pencatatan transaksi keuangan hingga penyajian data yang sudah menjadi bentuk laporan keuangan perusahaan.

#### **2. Akuntansi pemeriksaan (*Auditing*)**

Yang dimaksud akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dari hasil yang telah dicatat dan laporan keuangan dari suatu badan, laporan bisa dari perusahaan dan bisa juga dari pemerintah.

#### **3. Akuntansi manajemen (*Management Accounting*)**

Adalah salah satu bidang akuntansi yang memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi yang berkaitan kepada manajemen dalam menjalankan suatu usahanya.

#### **4. Akuntansi biaya (*Cost Accounting*)**

Adalah salah satu bidang akuntansi yang memiliki tugas untuk mencatat serta menghitung dan menganalisis dari suatu data yang berada pada perusahaan industri yang dalam usahanya menentukan beberapa besar dari harga pokok produksi dari suatu barang atau dari suatu produk.

#### 5. Akuntansi Pemerintahan

Adalah suatu bidang akuntansi yang digunakan untuk menerapkan dilembaga pemerintahan ini memiliki tujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan negara.

#### 6. Akuntansi Pendidikan

Adalah suatu bidang akuntansi di bidang khusus yaitu diarahkan di bidang pendidikan. Akuntansi pendidikan ini biasanya mengajar akuntansi, memberi pengetahuan tentang akuntansi, cara penyusunan kurikulum pendidikan atau hal lain yang masih berhubungan dengan ilmu akuntansi.

### **2.1.3 Pengertian Keuangan Sektor Publik**

Menurut Rahmat (2010:19), akuntansi adalah sistem pelaporan, perhitungan, pengelompokan, informasi, dan ringkasan-ringkasan yang bersifat kuantitatif mengenai keuangan dengan seluruh transaksi yang sudah dilaksanakan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Sedangkan sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2019:2).

Menurut Sujarweni (2015:1), akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan

melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai bidang yakni akuntansi pemerintah pusat, akuntansi pemerintah daerah, akuntansi desa, akuntansi tempat peribadah (mesjid, gereja, pura, wihara), akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akuntansi yayasan, akuntansi pendidikan dan akuntansi kesehatan (Sujarweni, 2015:2).

Di sektor privat (swasta), laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan / SAK (2007) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Sedangkan disektor publik, khususnya di lingkungan pemerintahan, laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan /PSAP 01 paragraf 17, merupakan laporan yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban antitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk aporipisasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi

mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

#### **2.1.3.1 Standar Akuntansi Sektor Publik**

Mardiasmo (2018:186) standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasi standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin.

#### **2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP adalah laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah masyarakat, para wakil rakyat, para pengawas, lembaga pemeriksa, para pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah.

Mahmudi, (2016 : 2) Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu :

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD.
2. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*), yaitu pertanggung jawaban .

#### **2.1.4.1 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Mahmudi, (2016:6) Banyak pihak yang masih berpendangan rendah bahwa penyajian laporan keuangan hanya merupakan formalitas dalam rangka memenuhi ketentuan perundangan saja. Laporan keuangan yang dipublikasikan belum benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, bahkan seringkali keputusan yang dilakukan lebih banyak didasari oleh keputusan politis semata. Investor pun dalam menentukan keputusan berinvestasi seringkali tidak begitu merisaukan kondisi laporan keuangan pemerintah daerah tempat mereka akan berinvestasi. Keputusan berinvestasi lebih banyak dipengaruhi oleh

informasi lain, misalnya kondisi keadaan daerah, stabilitas politik, kemudahan birokrasi dan peraturan daerah, serta dukungan infrastruktur yang ada.

Kurang dimanfaatkannya laporan keuangan itu karena masih rendahnya budaya akuntabilitas dan budaya membuat laporan keuangan. Penyebab lainnya adalah masih adanya masyarakat yang kurang rasional atau cenderung emosional dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan akan terasa sekali manfaatnya dikala masyarakat semakin rasional dalam menentukan keputusan ekonomi, sosial, dan politiknya.

Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan adalah : (Mahmudi, 2016:7)

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan meprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditasnya dan solvabilitasnya,
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan meprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi,
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan,
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

#### **2.1.5 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Adapun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah : (Mahmudi, 2016 :4)

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik
2. Untuk alat akuntabilitas publik
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah yang merupakan salah satu bagian dari standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan mengenai tujuan laporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan : (Mahmudi, 2016 : 5)

1. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi dan ekuitas pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban ekuitas pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.



### **2.1.6 Komponen Laporan Keuangan Daerah**

Di dalam PSAP 01 paragraf 14 disebutkan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

b. Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

c. Laporan Arus Kas; dan

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi yang lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 232 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya di dalam ayat (6) pada pasal yang sama disebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan meliputi ;

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Neraca;
- c) Catatan atas Laporan Keuangan.

### **2.1.7 Laporan Arus Kas**

Menurut Arifin (2015: 26) Aliran/ arus kas merupakan salah satu dari laporan keuangan yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan lainnya seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan surplus/

defisit, dan lain-lain, yang sangat bermanfaat bagi para pengguna keputusan baik intern/ekstern suatu entitas tertentu.

Mahmudi (2016: 183) Laporan arus kas bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran tentang mutasi kas akibat dari aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah. Laporan arus kas menggambarkan pengaruh aktivitas pemerintah daerah yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas transitoris terhadap kondisi kas pemerintah daerah. Laporan arus kas merupakan penghubung antara rekening riil yang ditunjukkan dalam laporan Neraca dengan rekening nominal dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### **2.1.7.1 Manfaat Arus Kas**

Laporan arus kas di sektor bisnis jika dibandingkan dengan sektor publik terdapat beberapa perbedaan baik format maupun tujuannya. Di sektor bisnis, Laporan Arus Kas menggambarkan kinerja Organisasi dalam menghasilkan kas hal ini terkait dengan asumsi bahwa organisasi bisnis dibentuk menghasilkan laba (*profit motive*) sehingga organisasi merupakan mesin penghasil uang atau penghasil kekayaan yang dicerminkan dari kemampuannya menghasilkan laba atau kas. Berbeda dengan sektor bisnis, sektor publik sektor publik tidak bertujuan mengejar laba tetapi pemberi pelayanan publik (*publik service*). Pelayanan publik yang harus disediakan bersifat massal dan harus memenuhi prinsip keadilan pemerataan.

Mahmudi (2016 : 185) laporan arus kas memberi manfaat sebagai berikut:

1. untuk mengetahui penyebab terjadinya surplus atau defisit anggaran
2. untuk memprediksi kemampuan fiskal pemerintah daerah di masa datang

3. untuk memprediksi kesinambungan fiskal pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik.

#### **2.1.7.2 Komponen Arus Kas**

Menurut Mahmudi (2016: 185) Laporan arus kas diklasifikasikan dalam empat komponen aktivitas : 1) Aktivitas operasi, 2) aktivitas investasi, 3) aktivitas pendanaan, dan 4) aktivitas transitori. Dalam masing- masing aktivitas dilaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar sehingga diperoleh informasi tentang arus kas bersih dari tiap aktivitas. Arus kas bersih dari ke empat aktivitas kemudian dijumlahkan sehingga diketahui kenaikan atau penurunan kas bersih selama satu periode akuntansi. Saldo akhir kas yang di Laporan Arus Kas diperoleh dari data neraca awal periode ditambah dengan kenaikan atau penurunan kas selama satu periode akuntansi tersebut. Saldo akhir Laporan Arus Kas akan sama dengan saldo kas yang dilaporkan di Neraca di akhir periode.

Menurut Arifin (2015), klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pedanaan dan aktivitas nonanggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh darin aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, aktivitas aset nonkeuangan, aktivitas pendanaan dan aktivitas nonanggran.

##### **1. Aktivitas operasi**

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan arus dan pengeluaran kas yang bertujuan untk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan

operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar (Arifin:2015).

Arus kas masuk dari aktivitas operasi meliputi:

- a. Pendapatan Pajak Daerah
- b. Pendapatan Retribusi Daerah
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- d. Lain-Lain PAD Yang Sah
- e. Dana Hasil Bagi Pajak
- f. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- g. Dana Alokasi Umum
- h. Dana Alokasi Khusus
- i. Dana Otonomi Khusus
- j. Dana Penyesuaian
- k. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
- l. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
- m. Pendapatan Hibah
- n. Pendapatan Dana Darurat

Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi meliputi:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang
- c. Bunga
- d. Subsidi
- e. Hibah
- f. Bantan Sosial

- g. Belanja Tak Terduga
  - h. Bagi Hasil Pajak
  - i. Bagi Hasil Retribusi
  - j. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
2. Aktivitas investasi Aset Nonkeuangan

Menurut Arifin (2015: 30) Aktivitas investasi Aset Nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus kas dari ktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan daan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimas akan datang.

Arus Kas masuk dari Aktivitas Investasi meliputi:

- a. Pendapatan Penjualan Aset Tetap- Tanah
  - b. Pendapatan Penjualan Aset Tetap- Peralatan Mesin
  - c. Pendapatan Penjualan Aset Tetap- Gedung dan Bangunan
  - d. Pendapatan Penjualan Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan
  - e. Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya
  - f. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya.
3. Aktivitas pembiayaan.

Arus Kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan unk memprediksi klaim pihak lain dan terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa akan datang (arifin:2015).

Arus kas Masuk dari Aktivitas Investasi meliputi :

- a. Pencairan Dana Cadangan
- b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Divestasi)
- c. Penerimaan Hasil Privatisasi Perusahaan Daerah
- d. Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemerintah Pusat
- e. Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- f. Pinjaman Dalam Negeri Kepada Lembaga Keuangan Bank
- g. Pinjaman Dalam Negeri Kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
- h. Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pemerintah Daerah
- i. Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
- j. Penerimaan kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
- k. Penerimaan kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
- l. Penerimaan kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- m. Penerimaan kembali Pelunasan Obligasi Pemerintah Daerah Lain
- n. Penerimaan kembali Investasi dalam Surat Utang Negara.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemerintah Pusat
- d. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- e. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Kepada Lembaga Keuangan Bank

- f. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
  - g. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pemerintah Daerah
  - h. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
  - i. Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
  - j. Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
  - k. Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
  - l. Pengeluaran Untuk Investasi Dalam Surat Utang Negara
  - m. Pengeluaran Untuk Investasi Dalam Proyek Pembangunan
  - n. Pengeluaran Untuk Investasi Dalam Kemitraan
  - o. Pengeluaran Untuk Investasi Jangka Panjang Lainnya.
4. Aktivitas non anggaran.

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Akses. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah (Arifin:2015).

Arus Kas Masuk dari Aktivitas NonAnggaran meliputi:

- a. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- b. Kiriman Uang Masuk (Mutasi Kas Antar- Rekening Kas Umum Daerah)



Arus Kas Keluar dari Aktivitas NonAnggaran

- a. Pengeluarn Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- b. Kiriman Uang Keluar.

### 2.1.7.3 Format Umum Laporan Arus Kas (Metode Langsung)

Mahmudi (2016: 190-191) Berikut ini adalah format umum Laporan Arus Kas metode langsung, namun tidak berarti semua pos ditampilkan harus terisi. Pemerintah daerah dapat meyajikan Laporan Arus Kas yang lebih ringkas tetapi informatif. Berikut contoh format Laporan Arus Kas metode langsung:

**Tabel 2.1**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH DAERAH NAGARAKARTAGAMA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x0 Dan 20x1**

Uraian	20x0	20x1
<b>ARUS KAS DARI AKTTIVITAS OPERASI</b>		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx
Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
Lain- lain PAD yang Sah	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Pendapatan Hibah	xxx	xxx
Lanjutan tabel 2.1	xxx	xxx
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Kas (1 Januari 2013)</b>	xxx	xxx
<b>Kas yang digunakan</b>	xxx	xxx
<b>Kas (31 Desember 2013)</b>	xxx	xxx
<b>Kas (1 Januari 2013)</b>	xxx	xxx
<b>Kas yang digunakan</b>	xxx	xxx
<b>Kas (31 desember 2013)</b>	xxx	xxx
Bantual Sosial	xxx	xxx
Belanja Tak Terduga	xxx	xxx
Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN</b>		
<b>Arus Kas masuk</b>		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	xxx	xxx
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Belanja Modal Tanah		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
Belanja Modal Jalan Irigasi, dan Jaringan		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
Belanja Modal Aset Lainnya		
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeu</b>		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Penggunaan SiLPA tahun lalu	xxx	xxx
Pencaira Dana Cadangan	xxx	xxx
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri- lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	xxx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman	xxx	xxx
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
Penyertaan Modal pemerintah daerah	xxx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx
Pemberian Pinjaman	xxx	xxx
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Aru Kas Bersih Dari aktivitas Pembiayaan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORI</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Pengeluaran Pengeluaran Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx

Lanjutan tabel 2.1

<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas nonanggran</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber : Mahmudi (2016: 191-193)

#### 2.1.7.4 Format Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini surplus/defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferal*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu atau yang akan datang serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi nonkeuangan dan pembiayaan (Arifin,2015).

**Tabel 2.2**  
**PT. CIBALAPULANG**  
**Laporan Arus Kas (metode tidak langsung)**  
**Untuk periode yang berakhir, December 31,2013**

<b>Aktivitas Operasi</b>		
Pendapatan bersih	xxxx	
Kenaikan piutang	xxxx	
Kenaikan utang usaha	xxxx	
Kenaikan utang karyawan	xxxx	
Kenaikan utang pajak	xxxx	
Keuntungan dari penjualan perlengkapan	xxxx	
Keuntungan dari penjualan perlengkapan	xxxx	
Keuntungan dan penjualan tanah	xxxx	
Beban amortisasi paten	xxxx	
Beban depresi kendaraan	xxxx	
Beban depresi gedung	xxxx	
<b>Kas diterima dari aktivitas operasi</b>		xxxx
Aktivitas investasi	xxxx	
Penjualan perlengkapan	xxxx	
Pembelian perlengkapan	xxxx	
Penjualan tanah	xxxx	
Pembelian tanah	xxxx	
Pembelian kendaraan	xxxx	
<b>Pembelian gedung</b>	xxxx	
<b>Kas digunakan untuk aktivitas investasi</b>	xxxx	xxxx

Lanjutan tabel 2.2

<b>Aktivitas pendanaan</b>	xxxx	
Pembayaran dividen	xxxx	
Penerbitan saham biasa	xxxx	
<b>Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>		xxxx
	xxxx	
Kas (1 Januari 2013)	xxxx	
Kas yang digunakan	xxxx	
Kas (31 Desember 2013)	xxxx	

Sumber: Arifin (2015)

### 2.1.8 Analisis Laporan Arus Kas

Mahmudi (2016: 193) Laporan Arus Kas merupakan Informasi keuangan yang sangat penting baik bagi manajemen maupun pengguna laporan eksternal, misalnya investor, kreditor, donor dan masyarakat. Berbeda dengan laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan neraca yang masih memungkinkan dilakukan manipulasi laporan misalnya dalam bentuk *window dressing*, Laporan Arus Kas Relatif sulit dimanipulasi. Laporan Arus Kas mencerminkan kondisi objektif kas, perubahan selama satu periode, arus kas masuk dan arus kas keluar yang sangat jelas yang dapat diuji kebenarannya dengan melihat neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Realisasi Anggaran. Dalam membaca dan memahami laporan arus kas, fokus perhatian hendaknya tidak ditujukan pada jumlah kenaikan atau penurunan kas dan setara kas selama satu periode, karena jumlah arus kas neto bisa saja kurang memberikan informasi yang bermakna. Yang paling penting adalah informasi dari masing-masing komponen Arus kas secara individual.

#### 2.1.8.1 Teknik Atau Cara Untuk Analisis Laporan Arus Kas

##### 1. Analisis pertumbuhan arus kas

Menurut Mahmudi (2016:194) Analisis Pertumbuhan Arus Kas bermanfaat untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan arus kas dari masing-

masing aktivitas selama beberapa tahun. Pertumbuhan arus kas ini dapat digunakan untuk :

- a. Menilai bagus atau tidaknya fundamental fiskal pemerintah daerah
- b. Menilai, mengevaluasi, dan memproyeksikan arah kebijakan keuangan daerah.
- c. Memperbaiki manajemen arus kas di masa depan.

**Tabel 2.3**  
**Analisis pertumbuhan kas**

NO.	Arus Kas Bersih	Tahun		Pertumbuhan	
		Th.X	Th.X-1	Rp.	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/4
1	Aktivitas Operasi				
2	Aktivitas Investasi				
3	Aktivitas pembiayaan				
4	Kenaikan(Penurunan) kas				

*Sumber : Mahmudi (2016:194)*

#### **a. Analisis Arus Kas Dari Aktivitas Operasi**

Mahmudi (2016: 196) Arus kas dari aktivitas operasi merekam perjalanan keluar masuk kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Kas dari operasi mengukur jumlah kas yang dihasilkan dan yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari dilakukannya aktivitas operasional rutin pemerintah daerah terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Jika arus kas bersih dari aktivitas operasi bersaldo positif, maka hal itu mengindikasikan bahwa secara internal pemerintah daerah memiliki kemandirian dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional rutinnya. Tetapi apabila arus kas bersih dari aktivitas bersaldo negatif, maka hal itu mengindikasikan diperlukannya suntikan dana dari luar yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan operasi pemerintah daerah.

### **b. Analisis Arus Kas Dari Aktivitas Investasi**

Mahmudi (2016: 196) Arus kas dari aktivitas investasi terkait dengan pengeluaran kas untuk memperoleh aset tetap baru atau penambahan kapasitas aset tetap lama serta penerimaan kas dari penjualan aset tetap lama. Arus kas dari aktivitas investasi yang bersaldo negatif menunjukkan pemerintah daerah pada tahun bersangkutan telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap yang nilainya lebih besar dibandingkan kas yang diperoleh dari kegiatan investasi penghentian atau penjualan aset tetap. Sebaliknya jika kas investasi bersaldo positif, maka hal itu mengindikasikan pemerintah daerah tidak melakukan investasi aset tetap secara agresif, bahkan menunjukkan adanya kecenderungan terjadi pelepasan aset tetap.

### **c. Analisis Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan**

Mahmudi (2015:197) Arus kas dari aktivitas pembiayaan menunjukkan arus kas yang terkait dengan struktur ekuitas pemerintah daerah, yaitu struktur ekuitas dana dan kewajiban. Arus kas dari aktivitas operasi meliputi penerimaan kas yang berasal dari sumber pembiayaan internal maupun eksternal serta pengeluaran kas untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok pinjaman, serta pemberian pinjaman daerah. Penerimaan kas yang bersumber dari pembiayaan internal meliputi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), penggunaan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pengelolaannya (divestasi dan privatisasi perusahaan daerah), serta penerimaan pinjaman. Arus kas dari aktivitas pembiayaan yang bersaldo positif mengindikasikan adanya masalah keuangan di pemerintah daerah misalnya berupa defisit yang besar jumlahnya sehingga memaksa digunakannya sumber pembiayaan internal maupun eksternal.

Sebaliknya arus kas pembiayaan yang bersaldo negatif mengindikasikan adanya kesehatan keuangan daerah yang cukup baik, terjadi surplus dana cadangan, melakukan investas aset keuangan daerah dalam bentuk surat berharga dan penyertaan modal, melunasi pinjaman daerah, atau pemberian pinjaman daerah.

## 2. Analisis Arus Kas Bebas (*free Cash Flow*)

Mahumudi (2016:197) Arus kas bebas adalah arus kas operasi dikurangi dengan pengeluaran kas untuk belanja modal yang terdapat pada aktivitas investasi. Arus kas bebas menunjukkan jumlah uang yang masih tersisa setelah pemerintah daerah menjalankan operasional pokoknya dan melakukan belanja modal dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan dan peningkatan kapasitas pelayanan. Arus kas bebas dapat dihitung sebagai berikut :

**Arus kas bebas = Arus kas bersih aktivitas operasi – arus kas keluar aktivitas investasi (belanja modal).**

Analisis Arus Kas bebas dimaksudkan untuk mengukur ketersediaan kas pemerintah daerah yang bebas penggunaannya sesuai dengan kebijakan (diskresi) daerah untuk pemenuhan kewenangan pilihannya setelah dilakukan pengeluaran kas dalam rangka pelaksanaan wajibnya. Pemerintah daerah yang kinerjanya baik akan memiliki Arus Kas bebas yang positif yang berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kelebihan kas (surplus) yang dapat digunakan untuk menambah dana cadangan, melunasi utang daerah atau melakukan investasi daerah dalam bentuk penyertaan modal. Semakin besar nilai Arus Kas Bebas, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan penelitian ini:

**Tabel 2.4**  
**Kesimpulan Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti (tahun)	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Mukhlis Abdi Farza (2010)	Analisis laporan arus Kas Untuk mengukur Kinerja keuangan pemerintah Kota Batu	Menunjukkan bahwa hasil kinerja keuangan Pemerintah Kota Batu baik. berdasarkan hasil analisis tingkat kecukupan arus kas memenuhi kebutuhan pemerintah untuk membayar hutang jangka panjang sangat besar.
2.	Tio Andri Prasetyo (2012)	Analisis Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Magetan Periode 2007- 2011	Menunjukan bahwa Laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Magetan periode tahun 2007- 2011 dikatakan sehat dan telah sesuai dengan peraturan pemerinatah Nomor 24 tahun 2005 tentag SAP. Namun masih terdaat sedikit kelasahan dan perlu perbaikiakan.
3	Florina banggut (2013)	Analisis Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009-2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Arus Kas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009-2011 mengalami defisit dimana kondisi ini dilihat dai jumlah kas di Bendahara Pengeluaran lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kas di Bendahara Penerimaan selama Tahun 2009- 2011</li> <li>2. Faktor- faktor yang menyebabkan peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2009 ke taun 2010 yaitu peningkatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana bagi hasil pajak, DAU dana penyesuaian, pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi, belanja pegawai, belanja barang, dan bantuan sosial kemasyarakatan. Sedangkan faktor-faktor yang terjadinya penurunan jumlah arus kas bersih dari tahun s2010 ke tahun 2011 yaitu penurunan pendapatan bagi hasil lainnya, bantuan sosial</li> </ol>



Lanjutan tabel 2.4

			kemasyarakatan, dan belanja bantuan keuangan.
4.	Ema Giyan Subekti, Mohamad Hasanudin (2014)	Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2008-2009	Berdasarkan hasil pertumbuhan arus Kas dan analisis kas bebas pada pemerintah Kabupaten Demak tahun anggaran 2008- 2009 yaitu dilihat dari analisis arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan saldo positif yang berarti bahwa memiliki kinerja keuangan yang baik, analisis arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan bahwa saldo negatif yang berarti selama periode tersebut aktif melakukan pembangunan t dalam bentuk investasi aset tetap yang ditandai dengan telah terjadi belanja modal yang besar dibandingkan penerimaan kas dari penjualan aset tetap. Analisis arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan menunjukkan saldo negatif baik untuk tahun 2008 maupun tahun 2009 yang mengindikasikan adanya kesehatan keuangan daerah yang cukup baik karena terjadi di tahun 2009 yang lebih kecil dibandingkan tahun 2008 mengindikasikan kinerja menurun. Analisis arus kas bebas dapat di hasilkan bersaldo dan jumlahnya naik tahun 2009. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan kinerja keangan pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2008.
5.	Yohanes Karolus (2014)	Analisis Laporan Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang	(1) Hasil analisis dari aktivitas operasi, menunjukkan pada Tahun 2010 arus kas bersih meningkat sebesar 34,90% dan bersaldo positif. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kemandirian dana yang semakin besar (kinerja keuangan semakin baik). Dan saldo positif tersebut menunjukkan adanya kemandirian dana yang cukup dalam membiayai kegiatan operasionalnya (kinerja keuangan baik). Pada tahun 2011 dan 2012 arus kas bersih menurun sebesar 0,76% dan 21,28%, serta bersaldo positif. Penurunan tersebut menunjukkan adanya kemandirian dana yang semakin kecil (kinerja keuangan semakin buruk); (2) Hasil analisis dari aktivitas investasi aset nonkeuangan, menunjukkan pada

Lanjutan tabel 2.4

			<p>Tahun 2010 arus kas bersih menurun sebesar 38,77% dan bersaldo negatif. Penurunan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan aset tetap yang semakin besar (kinerja keuangan semakin baik). dan saldo positif tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan aset tetap (kinerja keuangan baik). Pada Tahun 2011 dan 2012 arus kas bersih meningkat sebesar 28,18% dan 28,14%, serta bersaldo negatif. Peningkatan tersebut menandakan adanya pertumbuhan aset tetap yang semakin kecil (kinerja keuangan semakin buruk); (3) Hasil analisis dari aktivitas pembiayaan, menunjukkan pada Tahun 2010 dan 2011 arus kas bersih menurun sebesar 35,52% dan 52,92% dan bersaldo positif. Penurunan tersebut menunjukkan semakin kecil pembiayaan netto yang diterima di saat mengalami defisit anggaran (kinerja keuangan semakin buruk). Dan saldo positif tersebut menunjukkan adanya pembiayaan netto yang dapat mengurangi defisit anggaran (kinerja keuangan baik). pada Tahun 2012 arus kas bersih meningkat sebesar 328,11% dan bersaldo positif. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besar pembiayaan netto yang diterima di saat mengalami defisit anggaran (kinerja keuangan yang semakin buruk); (4) Hasil analisis dari aktivitas nonanggaran, menunjukkan pada Tahun 2010 dan 2012 arus kas bersih menurun sebesar 270,04% dan 430,37% dan bersaldo negatif. Penurunan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan utang PFK yang lebih kecil (Kinerja keuangan semakin baik). Dan saldo negatif tersebut menunjukkan adanya penurunan utang PFK (Kinerja keuangan baik). Sedangkan sebaliknya pada Tahun 2011 arus kas bersih meningkat sebesar 104,3% dan bersaldo positif.</p>
6.	Mustofa Arifin (2015)	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah	Menunjukkan bahwa pada tahun 2009-2013 analisis arus kas dari aktivitas investasi non aset keuangan bersaldo

Lanjutan tabel 2.4

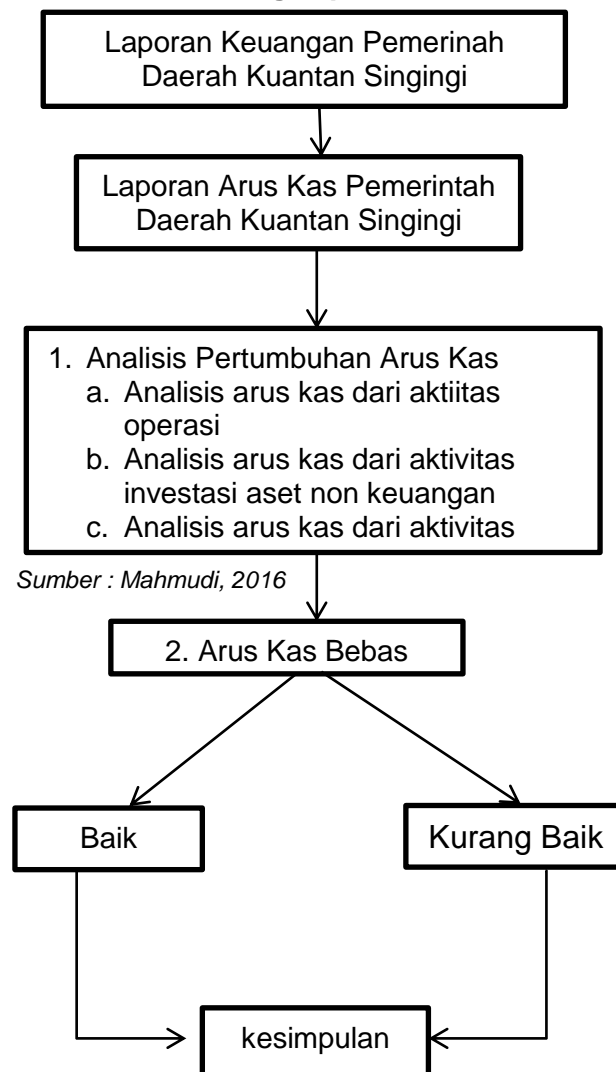
		Kabupaten Lumajang( studi kasus Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2009- 2013)	negatif hal ini menunjukkan adanya pengeularan kas untuk belanja modal yang lebih besar dibandingkan penerimaan kas penjualan aset tetap. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Tahun 2013 bersaldo positif menunjukkan bahwa pada tahun tersebut pemerintah daerah tealah menggunakan pembiayaan penerimaan daerah yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan. Arus kas bersih dan aktivitas no anggaran pada tahun 2009-2011 bersaldo negatif, hal mengindikasikan bahwa pada tahu tersebut terdapat ketidak patuhan pemerintah peraturan undang- undang. Sedangka tahun 2012- 2013 jauh lebih baik, hal ini mengindikasikan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pihak ketiga telah dilaksanakan dengan baik. Hasil analisa arus kas bebas menunjukkan bahwa tahun 2009- 2013 bersaldo positif. Kondisi tersebut mengindikasikan pemerintah kabupaten lumajang kinerja keuangannya cukup baik.
7.	Defota Batlayeti (2017)	Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Kabupten Maluku Tenggara Barat	Bahwa hasil analisis tingkat kecukupan arus kas kinerja keuangan Maluku Tenggara Barat jika dilihat dari rasio pembayaran hutang jangka panjang dapat dikatakan baik. Rasio likuiditasnya mengalami enurunan atas pkemampuan untuk mengubh aktiva menjadi kas atau untuk mendapatkan kas semakin menurun.
8.	Hedi Pandowo dan Ahmad Kudhori (2017)	Analisis laporan arus kas pemerintah daerah (studi kasus di pemerintah kota madiun)	Menunjukkan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan arus kas tahun 2012-2016 dri aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan menunjukkan kinerja keuangan yang baik dari Pemerintah Kota Madiun. Dan analisa arus kas bebas selama tahun 2012-2016 terdapat arus kas bebas yang cukup besar sehingga dengan adanya arus kas bebas yang besar mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan kas ( surplus) yang dapat digunakan untuk menambah dana cadangan, melunasi hutang daerah atau

			melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal.
9.	Alfi Kismawati (2017)	Analisis laporan arus kas dalam menilai kinerja Keuangan koperasi wanita al-barokah kec. Soko Kab. Tuban	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari kedelapan rasio laporan arus kas, terdapat dua rasio yang memenuhi standar 1 yaitu Rasio Rasio Cakupan Arus Dana Dan Cakupan Arus Kas Terhadap Bunga, dan keenam rasio selain diatas belum memenuhi standar 1, yaitu Rasio Arus Kas Operasional, Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar, Rasio Pengeluaran Modal, Rasio Total Hutang, Rasio Arus Kas Bersih Bebas, Dan Rasio Kecukupan Arus Kas. <i>Trend</i> kinerja keuangan Koperasi Wanita Al-Barokah tahun 2015-2017 di nilai dari rasio laporan arus kas cenderung menurun, dari kedelapan rasio arus kas koperasi, hanya Rasio Cakupan Arus Dana yang mengalami kenaikan, selain itu <i>trend</i> rasio lainnya mengalami penurunan. Kinerja keuangan Koperasi Wanita Al-Barokah tahun 2015-2017 dinilai dari rasio laporan Arus kas dinyatakan kurang baik, kinerjanya di katakan kurang baik karena Dari perhitungan kedelapan rasio arus kas di atas menyatakan bahwa enam Rasio belum memenuhi standar 1, dan hanya dua rasio yang memenuhi Standar 1, dan <i>trend</i> kinerja keuangan koperasi mengalami kecenderungan Menurun.
10.	Nida' Syada Hajar (2017) Asy Al	Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Rumah Sakit XYZ	Hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan rasio arus kas, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap kinerja keuangan Rumah Sakit XYZ tahun 2016-2017 dikatakan tidak baik karena rata-rata nilai rasio pada tahun 2016 adalah -2.92 dan pada tahun 2017 adalah -0.54 berada dibawah angka 1 (satu).

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu pola yang menjelaskan alur sistematis yang dibangun berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan dalam menemukan model pemecahan masalah. Permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adaah untuk menilai sampai sejauh mana Laporan Arus Kas di Pemerintah Daerah Kabupten Kuantan Singingi di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kuantan Singingi.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**



*Sumber : Modifikasi Penelitian 2020*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha yang mengungkapkan pemecahan yang ada berdasarkan data yang aktual, yakni menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya (Arifin, 2015:38). Metode Kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitik yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai mana yang ungkapkan oleh sugiyono,( 2012:3), adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu yang data mengandung makna. Metode kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada Badan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Jl. Rusdi S. Abrus Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singigi. Penelitian dilakukan dari Bulan Desember sampai dengan Agustus 2020.

Adapun waktu pada penelitian ini dapat dilihat dari dari tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

Pelaksanaan Kegiatan										
Jenis kegiatan	Des 19	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	Mei 20	Jun 20	Juli 20	Aug 20	sept
Pencarian Data Awal										
Penyusunan Proposal										
Pengajuan Proposal										
Penyerahan Proposal Kepada Dosen Pembimbing										
Bimbingan Proposal										
Seminar Proposal										
Revisi Proposal										
Penelitian Lapangan										
Bimbingan Skripsi										
Ujian Skripsi										

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun, 2020

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2011 : 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam peneltian ini adalah Data laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3.3.2 Sampel**

Menurut Masngudi dalam Nursalim (2012 : 20) sampel adalah sebagian atau wakil dari objek yang akan diteliti. Sedangkan menurut Sugiono (2011:116) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan arus kas Pemerintah Daerah Kuantan Singingi periode 2014-2018.

## **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (Arikunto, 2013: 171). Data ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen dan observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Menurut Sugiyono (2012: 141) bahwa data sekunder adalah “sumber data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh dinas terkait”. Peneliti menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak yang berwenang dalam bentuk dokumen seperti laporan arus kas dan data lain yang diperlukan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data laporan arus



kas dan data profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Singingi.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu :

1. Observasi,

Observasi dalam penelitian ini berupa peninjauan awal dengan melakukan pengamatan langsung ke kantor Badan Pengeloaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) bagian keuangan Pemerintah Kabupten Kuantan Singingi.

2. Dokumen

Data utama penelitian ini diperoleh melalui dokumen yang berbentuk tulisan, peneliti memperoleh data langsung dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah. Dalam peneltian ini data yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi adalah sejarah perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan perusahaan mencakup laporan arus kas.

### **2.6 Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adala metode deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan data Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singing yang meliputi: (Mahmudi, 2016: 193-195)

#### **2.6.1 Analisis Pertumbuhan Arus Kas**

Menurut Mahmudi (2016:194) Analisis Pertumbuhan Arus Kas bermanfaat untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan arus kas dari masing – masing aktivitas selama beberapa tahun. Pertumbuhan arus kas ini dapat

digunakan untuk : Menilai bagus atau tidaknya fundamental fiskal pemerintah daerah, Menilai, mengevaluasi, dan memproyeksikan arah kebijakan keuangan daerah, Memperbaiki manajemen arus kas di masa depan. Dengan menggunakan teknik analisis pertumbuhan arus kas yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016: 194) maka analisis pertumbuhan arus kas dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Analisis Pertumbuhan Arus kas

NO.	Arus Kas Bersih	Tahun		Pertumbuhan	
		Th.X	Th.X-1	Rp.	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/4
1	Aktivitas Operasi				
2	Aktivitas Investasi				
3	Aktivitas pembiayaan				
4	Kenaikan(Penurunan) kas				

Sumber: Mahmudi, (2016:194)

#### a. Analisis Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Menurut Arifin(2015: 42) analisis arus kas dari aktivitas operasi adalah analisis arus kas untuk mengetahui aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintahan selama satu periode akuntansi. Dari hasil analisis arus kas dari aktivitas operasi dapat diketahui apakah pemerintah daerah memiliki kemandirian dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional rutinnya dan adanya jaminan kesinambungan fiskal organisasi dalam jangka panjang yang lebih baik. Ataukah sebaliknya adanya kesulitan keuangan daerah sehingga diperlukannya suntikan dana dari luar yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan operasi pemerintah daerah.

**Tabel 3.2**  
**Analisis Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus Kas Bersih	Indikasi
+ Positif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah daerah memiliki kemandirian dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional rutinnya.</li> <li>- Adanya jaminan kesinambungan fiskal organisasi dalam jangka panjang yang lebih baik.</li> </ul>
(-) Negatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengindikasikan sehingga diperlukannya suntikan dana dari luar yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan operasi pemerintah daerah.</li> </ul>

Sumber: Mahmudi, (2016:196)

**b. Analisis Arus Kas dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan**

Menurut Arifin (2015:43) Arus Kas dari aktivitas investasi adalah analisis arus kas untuk mengetahui aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Dari hasil analisis arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan dapat diketahui apakah pemerintah daerah melakukan investasi aset tetap secara agresif atau tidak, serta apakah ada kecenderungan terjadi pelepasan/penjualan aset tetap atau tidak yang mengakibatkan pertumbuhan aset tetapnya akan bernilai negatif atau positif.

**Tabel 3.3**  
**Analisis arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan**

Arus Kas Bersih	Indikasi
+ Positif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengindikasikan pemerintah daerah tidak melakukan investasi aset tetap secara agresif, bahkan menunjukkan adanya kecenderungan terjadi pelepasan aset tetap.</li> </ul>
(-) Negatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunjukkan pemerintah daerah pada tahun bersangkutan telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap yang nilainya lebih besar dibandingkan kas yang diperoleh dari kegiatan investasi penghentian atau penjualan aset tetap.</li> </ul>

Sumber: Mahmudi, (2016:196)

### c. Analisis Arus kas dari Aktivitas pembiayaan

Menurut Arifin (2015:43) adalah analisis arus kas untuk mengetahui aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

**Tabel 3.4**  
**Analisis arus kas dari aktivitas pembiayaan**

Arus Kas Bersih	Indikasi
+ Positif	- Mengindikasikan adanya masalah keuangan dipemerintah daerah misalnya berupa defisit yang besar jumlahnya sehingga memaksa digunakannya sumber pembiayaan internal maupun eksternal.
(-) Negatif	- Mengindikasikan adanya kesehatan keuangan daerah yang cukup baik, terjadi surplus dana cadangan, melakukan investas aset keuangan daerah dalam bentuk surat berharga dan penyertaan modal, melunasi pinjaman daerah, atau pemberian pinjaman daerah.

Sumber: Mahmudi, (2016:197)

### 2.6.2 Analisis Arus Kas Bebas

Menurut Mahmudi, (2016:197) Arus kas bebas adalah arus kas operasi dikurangi dengan pengeluaran kas untuk belanja modal yang terdapat pada aktivitas investasi. Arus kas bebas dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Arus kas bebas} = \text{Arus kas bersih aktivitas operasi} - \text{ arus kas keluar aktivitas investasi (belanja modal)}$$

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4. 1    Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1   Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi**

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah otonom adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan Pelelawan, Kabupaten Siak, Kabupen Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembar Negara tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 3968), dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.

Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdi S Abrus sebagai pejabat Bupati Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai bupati defenitif periode 2001-2006. Ditetapk n berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2001. Namun selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi bupati Kuantan Singingi.

Berikut adalah Daftar bupati yang memimpin Kabupaten Kuantan Singingi sejak pertama berdiri sampai sekarang.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Bupati Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Nama	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat	Wakil	Keterangan
1	Drs.H. Rusdi S.Abrus	8 Oktober 1999	1 Juni 2001	-	Pejabat Bupati
		1 Juni 2001	Agustus 2001	Asrul Ja'afar	Bupati Defenitif
2	Drs.H. Asrul Ja'afar	20 Agustus 2001	1 Juni 2016		Mengantikan Bupati yang Meninggal
3	H. Suk armis	1 Juni 2016	1 Juni 2011	Mursini	Periode kedua
		1 Juni 2011	1 Juni 2016	Zulkifli	Periode ketiga
4	Mursini	1 Juni 2016	1 Juni 2021	Halim	Bupati yang sekarang

Sumber: Olahan Data 2020

Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 7, 656, 03 km<sup>2</sup> dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas Permukaan Laut, yang berada pada posisi antara 0000- 10 00 Lintang selatan dan 1010 02 – 1010 55 Bujur Timur.

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Pelalawan .
2. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi.
3. Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat
4. Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu

Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi kedalam 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Desa terbanyak terdapat di Kecamatan Kuantan Mudik sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah kecamatan Singingi (1.953,66km<sup>2</sup>), kemudian diikuti dengan kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km<sup>2</sup>).

1. Kecamatan cerenti ibu kota cerenti
2. Kecamatan inuman ibukota inuman

3. Kecamatan Kuntan Hilir ibukota Baserah
4. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang ibukota Koto Rajo
5. Kecamatan Pangean Ibukota Pangean
6. Kecamatan Logas Tanah Darat ibukota Perhentian Luas
7. Kecamatan Benai ibu kota Benai
8. Kecamatan Sentajo Raya Ibu Kota Koto Sentajo
9. Kecamatan Kuantan Tengah ibukota Taluk Kuntan
10. Kecamatan Gunung Toar Ibu Kota Gunung Toar
11. Kecamatan Kuantan Mudik Ibu Kota Lubuk Jambi
12. Kecamatan Hulu Kuantan Ibu Kota Lubuk Ambacang
13. Kecamatan Pucuk Rantau Ibu Kota Pangkalan
14. Kecamatan Singingi Ibu Kota Muara Lembu
15. Kecamatan Singingi Hilir Ibu Kota Kota Baru

Dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah, kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi di bantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari 18 Dinas, 5 Badan dan 3 Kantor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Dinas Lingkungan Hidup
9	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Dinas Perhubungan
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
18	Dinas Pertanian
19	Badan Perencanaan, Pemabangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
20	Badan Pendapatan Daerah
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24	Inspektorat
25	Sekretariat Daerah
26	Sekretariat DPRD

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

#### **4.1.2 Visi Misi Kabupaten Kuantan Singingi**

##### **1. Visi**

Berdasarkan Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemabangunan daerah, visi adalah Rumusan umum mengenai Keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah:



*“ Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang unggul, Sejahtera dan Agamis”*

Makna Pernyataan visi Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Unggul adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat kesehatan, mutu pendidikan infrastruktur dan pariwisata.
2. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur yang tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib, dan harmonis.
3. Agamis adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun dan damai dalam menjalankan agama yang dianutnya.

## **2. Misi**

Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata.
4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terlihat bahwa beban Kerja bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah cukup luas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, fasilitasi, Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan penunjang urusan Pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Menindak lanjuti hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk lembaga Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi maka visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah “ Menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Lembaga yang Amanah dalam Pelayanan Publik”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Mengembangkan sistem manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah
3. Mengembangkan sistem manajemen Pengelolaan aset daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah.

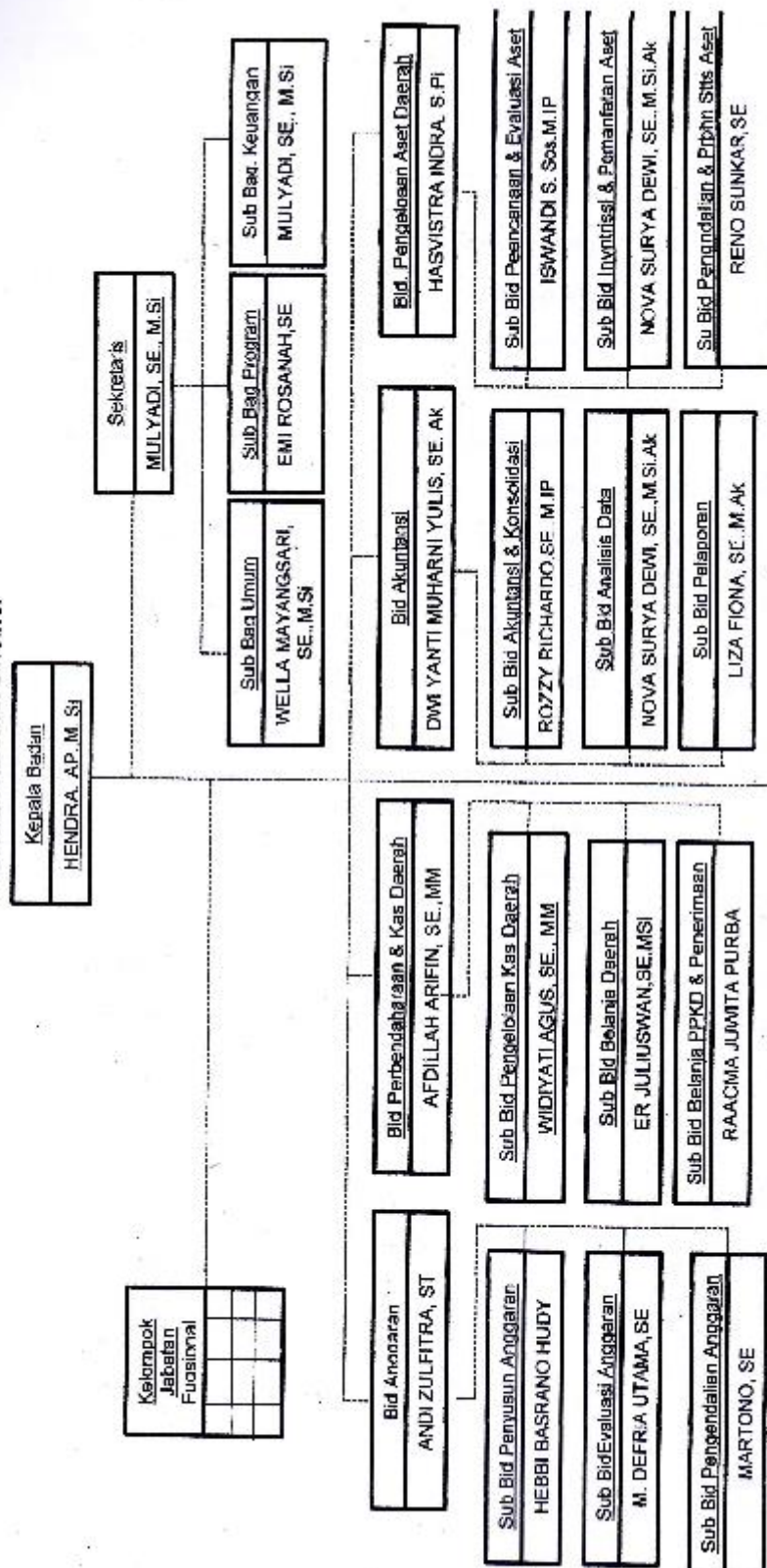
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan penunjang urusan Pemerintah di bidang Keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepala Badan Sub. Bagian, yang dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan. Sub Bag dipimpin oleh Kepala sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Susunn Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Program
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Anggaran, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Penyusunan Anggran
  - b. Sub Bidang Evaluasi Anggran
  - c. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Membawahkan:
  - a. Sub Bidang Pengeloaan Aset Daerah
  - b. Sub Bidang Belanja Daerah
  - c. Sub Bidang Belanja PPKD dan Penerimaan

5. Bidang Akuntansi, Membawahkan:
  - a. Sub Bidang Akuntaansi dan konsolidasi;
  - b. Sub Bidang Analisis Data;
  - c. Sub Bidang Pelaporan.
6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset
  - b. Sub Bidang Investasi dan Peanfaatan Aset
  - c. Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset.

GAMBAR 4.1  
STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Penjelasan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 45 tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;

Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Aset Daerah.

Kepala badan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset
- b. Pengkoordinasikan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c. Pelaksanaan fasilitas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- f. Pembinaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- g. Pengawasan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- h. Pengendalian dan monitoring dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- i. Pengevaluasian dan pelaporan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seseorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, saraa dan prasarana, penyelenggara rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan data
- b. Penyusun program dan anggaran di bidang umum, program dan keuangan
- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- d. Penyelenggara ketatausahaan
- e. Pembina kepegawaian
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana
- g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga
- h. Peyenggaraan perjalanan dinas
- i. Penyelenggaraan fungsi kehumasan
- j. Penyelenggaraan keprotokolan
- k. Pengelolaan keuangan.

l. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahkan:

a. Sub Bagian Umum;

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, penyelenggaran urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan keprotokolan. Kepala Badan sub Bagian umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

1. Penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan
2. Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana
3. Penyiapan bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga
4. Penyiapan bahan penyelenggaraan perjalanan dinas
5. Penyiapan bahan penyelenggaraan kehumasan
6. Penyiapan bahan penyelenggaraan keprotokolan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Program yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam



pengelolaan data, penyusutan dan pengkoordinasian rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kepala Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

1. Penyiapan bahan pengumpulan dan inventarisasi data
2. Penyiapan bahan penyusunan pegkajian dan analisis data
3. Penyiapan bahan penyajian data
4. Penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program evaluasi dan pelaporan sub bagian program.
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian program.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusun dan pengkoordinasian rencana anggaran pengolahan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

1. Penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana anggaran
2. Penyiapan bahan penataan penerimaan keuangan
3. Penyiapan bahan penataan penggunaan keuangan
4. Penyiapan bahan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

5. Penyiapan bahan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian keuangan
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Bidang Anggaran, membawahkan,
- Bidang anggaran di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Anggaran. Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran
  - b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang anggaran
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang anggaran
  - d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran.
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- Bidang Anggaran, membawahkan :
- a. Sub Bidang Penyusun Anggaran
- Sub Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Sub Bidang Penyusun Anggaran mempunyai tugas penyiapan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan,

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran. Kepala Sub Bidang Penyusun Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusun anggaran,
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran penyusunan anggaran
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan anggaran
4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan anggaran
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan failitasi pengelolaan penyusunan anggaran
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi penyusunan anggaran
7. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program penyusun anggaran
8. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Evaluasi Anggaran;

Sub Bidang Evaluasi Anggaran dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Sub Bidang Evaluasi Anggaran mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluai dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran. Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi anggaran
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran evaluasi anggaran
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis evaluasi anggaran
4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi anggaran
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan evaluasi anggaran
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi anggaran
7. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program evaluasi anggaran
8. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Sub Bidang Pengendalian Anggaran dipimpin oleh seorang sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian anggaran;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengendalian anggaran

3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian anggaran
  4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian anggaran
  5. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan pengendalian anggaran
  6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pengendalian anggaran
  7. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pengendalian anggaran
  8. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan :
- Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
  - b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang Perbendaharaan dan Kas daerah

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan:

- a. Sub Bidang Pengelola Kas Daerah

Sub Bidang Pengelola Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Sub Bidang Pengelola Kas Daerah mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran. Kepala Sub Bidang Pengelola Kas Daerah Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelola kas daerah
- 2. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengelola kas daerah
- 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelola kas daerah
- 4. Penyiapan bahan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelola kas daerah;
- 5. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan kas daerah

6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pengelola kas daerah
7. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pengelola kas daerah
8. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Belanja Daerah

Sub Bidang Belanja Daerah dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bidang. Sub Bidang Belanja Daerah mempunyai tugas penyiapan dalam erumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran. Kepala Sub Bidang Belanja Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis belanja daerah
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran belanja daerah
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian anggaran
4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan belanja daerah;
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan belanja daerah;
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi belanja daerah
7. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program belanja daerah;

8. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Belanja PPKD Dan Penerimaan

Sub Bidang Belanja PPKD dan Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bidang. Sub Bidang Belanja PPKD dan Penerimaan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran. Kepala Sub Bidang Belanja PPKD dan penerimaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Belanja PPKD dan penerimaan
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Belanja PPKD penerimaan
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Belanja PPKD dan Penerimaan
4. Penyiapan bahan pengkoordinasikan pelaksanaan Belanja PPKD dan Penerimaan
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Belanja dan Penerimaan
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Belanja PPKD dan Penerimaan
7. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Belanja PPKD dan Penerimaan



8. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi

Kepala bidang akuntansi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis akuntansi
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang akuntansi
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang akuntansi
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang akuntansi
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Akunansi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala Sub Bidang Akuntansi yang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Akuntansi dan konsolidasi

Sub Bidang Akuntansi dan Konsolidasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Konoilidasi mempunyai tugas peyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawsan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan konsolidasi. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Konsolodasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi dan konsolidasi

2. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran akuntansi dan konsolidasi
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis akuntansi dan konsolidasi
4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan akuntansi dan konsolidasi
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan akuntansi dan konsolidasi
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi akuntansi dan konsolidasi
7. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program akuntansi dan konsolidasi
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Analisa Data

Sub Bidang Analisa Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang Berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Kepala Sub Bidang Analisa Data mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan analisa data. Kepala Sub Bidang Analisis Data dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis analisa data

2. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran analisa data
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis analisa data
4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan analisa data
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan analisa data
6. Penyiapa bahan pembinaan, pengawsan, evaluasi, analisa data
7. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program analisa data.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pelaporan. Kepala Sub Bidang Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaporan
2. Penyiapan bahan perumusan penyusunan rencana program dan anggaran pelaporan
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan eknis pelaporan
4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pelaporan

5. Peyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan pelaporan
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaporan
7. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pelaporan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengeloaan Aset Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala Bbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memafasilitasi, pembinaan, pengwasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengeloaan Aset Daerah
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Pengelolaan Aset Daerah
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Aset Daerah
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan:

a. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset

Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kuntansi dan konsolidasi. Kepala sub Bidang Pengelolaan Perencanaan dan Evaluasi Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi aset
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian rencana program dan anggaran evaluasi aset
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis evaluasi aset
4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi aset
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan aset
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi aset
7. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program evaluasi aset
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset

Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasn, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan konsolidasi. Kepala Sub Bidang Inventarisai dan Pemanfaatan Aset dalam melaksanakan tugas meyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi dan pemanfaatan aset
2. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran inventarisasi dan pemanfaatan aset
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis inventarisasi dan pemanfaatan aset
4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan aset
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaa inventarisasi dan pemanfaatan aset
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi inventarisasi dan pemanfaatan aset
7. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program inventarisasi dan pemanfaatan aset
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fugsinya.

c. Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset

Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasn, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan konsolidasi. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan perubahan status aset;
2. Penyiapan bahan penyusunan program dan pengendalian perubahan status aset;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan perubahan status aset;
4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian dan perubahan status aset;
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelola pengendalian dan perubahan status aset;
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pengendalian dan perubahan status aset;
7. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pengendalian dan perubahan status aset
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.**

Dalam membaca dan memahami laporan arus kas, fokus perhatian hendaknya tidak ditujukan pada jumlah kenaikan atau penurunan kas dan setara kas selama satu periode, karena jumlah arus kas neto saja kurang memberikan informasi yang bermakna. Yang paling penting justru adalah informasi dari masing-masing komponen arus kas secara individual.

Menurut Mahmudi (2016:193) terdapat teknik atau cara untuk melakukan analisis laporan arus kas, yaitu:

1. Pertumbuhan Arus Kas,
2. Arus Kas untuk setiap komponen yaitu,
  - a. Arus dari Aktivitas Operasi,
  - b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi aset nonkeuangan,
  - c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
  - d. Arus Kas dari Aktivitas Transitori
3. Arus Kas bebas.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah, yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban daerah tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupten Kuantan Singingi di susun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten



Kuantan Singingi. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menyusun Laporan Keuangan Daerah (LKPD) satu tahun sekali yang akan disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menerapkan SAP dengan basis AkruaI sejak tahun 2012. Sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan, dimana sebelum menggunakan SAP AkruaI mereka hanya menyajikan 5 komponen laporan keuangan setelah menerapkan AkruaI Kabupaten Kuantan Singingi telah menyajikan 7 komponen laporan keuangan seseuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu, PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI. Tujuh komponen laporan keuangan yang dimaksud yaitu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasioanal (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penyusunan Laporan keuangan Kabupaten Kuantan Singingi disusun berdasarkan Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2014.

Laporan keuangan publikasian tersebut merupakan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK RI dengan Opini auditor Wajar Tanpa Pengecualian. Berdasarkan opini yang dikeluarkan BPK RI terhadap Lapora Keuangan Pemerintah Kabupten Kuantan Singingi mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 8 kali berturut-turut dari tahun 2012 hingga tahun 2018 untuk laporan keuangan tahun 2011 hingga tahun 2018.

Berdasarkan data-data yang didapat dalam penelitian ini, yaitu data Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2018, dapat diringkaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Laporan Arus Kas bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**  
**Tahun Anggaran 2014-2018**

Arus Kas Bersih	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	284.799.876.516,08	385.548.379.856,65	67.697.801.825,42	116.755.934.874,56	183.219.662.461,22	231.719.121.711,83
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(310.518.392.376,00)	(358.433.993.474,00)	(326.73.746.648,00)	(178.016.363.176,00)	(192.079.416.609,05)	(196.801.855.381,160)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	40.469.025,56	93.479.000,00	34.932.000,00	188.412.000,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari aktivitas non Anggaran	1.319.645.402,00	1.319.645.402,00	1.774.319,87,00	(5.205.439.876,00)	(6.535.166.737,60)	4.749.572.622,60
Kenaikan (penurunan) kas	(19.814.775.917,36)	28.527.510.784,65	(257.228.692.835,58)	(66.277.456.177,44)	(15.394.920.885,43)	39.666.838.952,83

Sumber: Data Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014-2018

Berikut hasil penelitian mengenai Analisis Laporan arus kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2014- 2018.

#### 4.2.1.1 Pertumbuhan Arus Kas

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Arus Kas Bersih Tahun } n - \text{Arus Kas Bersih Tahun } n-1}{\text{Arus Kas Bersih Tahun } n-1} \times 100 \%$$

##### a. Arus Kas Operasi

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Arus Kas Bersih Tahun } n - \text{Arus Kas Bersih Tahun } n-1}{\text{Arus Kas Bersih Tahun } n-1} \times 100 \% \\ &= \frac{385.548.379.856,65 - 284.799.876.516,08}{284.799.876.516,08} \times 100 \% \\ &= 35,38 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Arus Kas Bersih Tahun n} - \text{Arus Kas Bersih Tahun n-1}}{\text{Arus Kas Bersih Tahun n-1}} \times 100 \% \\
 &= \frac{67.697.801.825,42 - 385.548.379.856,65}{385.548.379.856,65} \times 100 \% \\
 &= -82,44 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Arus Kas Bersih Tahun n} - \text{Arus Kas Bersih Tahun n-1}}{\text{Arus Kas Bersih Tahun n-1}} \times 100\% \\
 &= \frac{116.755.934.874,56 - 67.697.801.825,45}{67.697.801.825,42} \times 100 \% \\
 &= 72,47\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Arus Kas Bersih Tahun n} - \text{Arus Kas Bersih Tahun n-1}}{\text{Arus Kas Bersih Tahun n-1}} \times 100\% \\
 &= \frac{183.219.662.461,22 - 116.755.934.874,56}{116.755.934.874,56} \times 100\% \\
 &= 56,93 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Arus Kas Bersih Tahun n} - \text{Arus Kas Bersih Tahun n-1}}{\text{Arus Kas Bersih Tahun n-1}} \times 100\% \\
 &= \frac{231.719.121.171,83 - 183.219.662.461,22}{183.219.662.461,22} \times 100\% \\
 &= 26,47 \%
 \end{aligned}$$

b. Arus Kas Investasi

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Arus Kas Bersih Tahun n} - \text{Arus Kas Bersih Tahun n-1}}{\text{Arus Kas Bersih Tahun n-1}} \times 100\% \\
 &= \frac{(358.433.993.474,00) - (310.518.392.376,00)}{(310.518.392.376,00)} \times 100\% \\
 &= 15,43\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Arus Kas Bersih Tahun n} - \text{Arus Kas Bersih Tahun n-1}}{\text{Arus Kas Bersih Tahun n-1}} \times 100\% \\
 &= \frac{(326.735.746.648,00) - (358.433.993.474,00)}{(358.433.993.474,00)} \times 100\% \\
 &= -8,84 \%
 \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Arus Kas Bersih Tahun n} - \text{Arus Kas Bersih Tahun n-1}}{\text{Arus Kas Bersih Tahun n-1}} \times 100\%$$

$$= \frac{(178.016.363.176,00) - (326.735.746.648,00)}{(326.735.746.648,00)} \times 100\%$$

$$= -45,52\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Arus Kas Bersih Tahun } n - \text{Arus Kas Bersih Tahun } n-1}{\text{Arus Kas Bersih Tahun } n-1}$$

$$= \frac{(192.079.416.609,05) - (178.016.363.176,00)}{178.016.363.176,00} \times 100\%$$

$$= -37,34\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Arus Kas Bersih Tahun } n - \text{Arus Kas Bersih Tahun } n-1}{\text{Arus Kas Bersih Tahun } n-1} \times 100\%$$

$$= \frac{(196.801.855.381,60) - (192.079.416.609,05)}{(192.079.416.609,05)} \times 100\%$$

$$= -25,25\%$$

c. Arus Kas Pembiayaan

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Arus Kas Bersih Tahun } n - \text{Arus Kas Bersih Tahun } n-1}{\text{Arus Kas Bersih Tahun } n-1} \times 100\%$$

$$= \frac{93.479.000.000 - 40.469.025,56}{40.469.025,56} \times 100\%$$

$$= 130,99\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Arus Kas Bersih Tahun } n - \text{Arus Kas Bersih Tahun } n-1}{\text{Arus Kas Bersih Tahun } n-1} \times 100\%$$

$$= \frac{34.932.000,00 - 93.479.000,00}{93.479.000,00} \times 100\%$$

$$= -62,63\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Arus Kas Bersih Tahun } n - \text{Arus Kas Bersih Tahun } n-1}{\text{Arus Kas Bersih Tahun } n-1} \times 100\%$$

$$= \frac{188.412.000,00 - 34.932.000,00}{34.932.000,00} \times 100\%$$

$$= 439,37\%$$

Dari perhitungan diatas dapat dibuat ringkasan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Pertumbuhan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi**  
**Tahun 2014- 2018**

Arus kas bersih	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Rata-rata
Arus Kas operasi (Rp)	100.748.503.340,57	(317.850.578.031,23)	49.058.133.049,14	66.463.727.586,66	48.499.459.250,61	
Pertumbuhan	35,38%	-82,84%	72,47%	56,93%	26,47%	21,76%
Arus Kas Investasi (Rp)	(47.915.601.098,00)	31.698.246.826,00	148.719.383.472,00	(14.063.053.433,05)	(4.722.438.772,55)	
Pertumbuhan	15,43%	-8,84%	-45,52%	7,90%	2,46%	5,71%
Arus Kas Pembiayaan (Rp)	53.009.974,44	(58.547.000,00)	153.480.000,00	0,00	0,00	
Pertumbuhan	130,99%	-62,63%	439,37%	0,00	0,00	169,24%
Kenaikan/ Penurunan Kas	28.527.510.784,65	(257.228.692.835,58)	(66.277.456.177,44)	(15.394.920.885,43)	39.666.838.952,83	
Saldo awal Kas	326.387.866.395,10	353.473.854.347,75	96.245.161.512,17	31.328.682.693,73	16.572.974.004,90	
Saldo Akhir Kas	355.994.870.614,23	99.753.430.144,17	33.938.669.725,63	21.275.145.396,50	56.240.013.557,73	

Sumber: Olahan Data Tahun 2020

Dari data di atas dapat kita lihat Pertumbuhan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2014- 2015 dapat melakukan analisis sebagai berikut:

**a. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi**

Pertumbuhan Rata- rata Arus Kas dari aktivitas operasi selama tahun 2014-2018 pertumbuhannya positif, ini merupakan hal yang bagus menunjukkan tidak adanya kesulitan keuangan pemerintah daerah. Kecuali Pada Tahun 2015 pertumbuhan arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi justru negatif yaitu sebesar -82,84% dan mengalami penurunan arus kas operasi sebesar Rp.(317.850.578.031,23) dari tahun sebelumnya, penurunan arus kas tersebut dapat dikatakan kurang baik, sebab diharapkan pertumbuhan arus kas operasi positif yang berarti ada peningkatan dari tahun ketahun, bukan justru sebaliknya. Pada tahun 2016 pertumbuhan arus kas operasi sebesar

72,47% dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 49.058.133.049,14 dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kesehatan keuangan dan kesinambungan fiskal yang baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Tahun 2017 pertumbuhan arus kas operasi sebesar 56,93% yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp. 66.463.727.586,66 dari tahun sebelumnya, hal ini juga menunjukkan adanya kesehatan keuangan dan kesinambungan fiskal yang baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pada Tahun 2018 pertumbuhan arus kas operasi sebesar 26,47% mengalami kenaikan sebesar Rp. 48.499.459.250,61 dari tahun sebelumnya hal ini juga menunjukkan adanya kesehatan keuangan dan kesinambungan fiskal yang baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Jika dilihat data diatas dapat dilihat bahwa arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2014-2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini menunjukkan bahwa adanya kesehatan keuangan dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang baik meskipun mengalami penurunan pada tahun 2015.

Jika dilihat dari lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2018 rata-rata pertumbuhan arus kas dari aktivitas operasi pertahunnya sebesar 21,76%. Berdasarkan buku Mahmudi yang menjelaskan bahwa jika arus kas bersaldo positif menunjukkan tidak adanya masalah keuangan di Pemerintah daerah, dan hal ini menunjukkan adanya kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi baik. Meskipun adanya penurunan arus Kas dari aktivitas operasi pada tahun 2015.

**b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi NonKeuangan**

Dari tabel 4.2 Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2014-2018 bersaldo negatif, berarti pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama lima tahun tersebut aktif melakukan pembangunan fisik dalam bentuk investasi aset tetap. Sedangkan pertumbuhan arus kas dari aktivitas investasi nonkeuangan dapat dilihat di tahun 2014 yaitu 15,34% Pada tahun 2015 pertumbuhan arus kas dari aktivitas investasi sebesar -8,84%, dan tahun 2016 sebesar 45,52%, pada tahun 2017 sebesar 7,90% dan tahun 2018 sebesar 2,46%. Berdasarkan hasil analisis diatas pertumbuhan arus kas dari aktivitas investasi pada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan hal ini mengindikasikan pemerintah daerah Kabupaten Singingi tidak melakukan investasi aset tetap secara agresif, bahkan menunjukkan adanya kecenderungan terjadinya pelepasan aset tetap. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kurang baik.

**c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan**

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa Pertumbuhan arus kas dari aktivitas pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2014-2018 yaitu pada tahun 2014 sebesar 130,99%, tahun 2015 sebesar -62,63% tahun 2016 sebesar 439,37% dan tahun 2017-2018 sebesar 0%. Hal menunjukkan bahwa tahun 2014 bersaldo positif menunjukkan bahwa pada tahun tersebut pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menggunakan instrumen pembiayaan penerimaan daerah yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan. Instrumen pembiayaan tersebut berupa penggunaan SILPA tahun lalu, penggunaan dana cadangan maupun

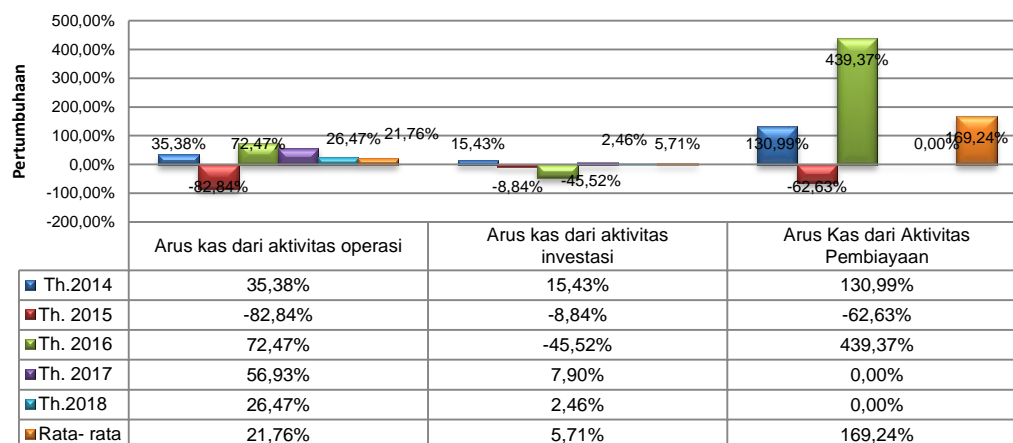
pinjaman daerah. Sementara itu pada tahun 2015 bersaldo positif dan pertumbuhan Arus Kas dari pembiayaan negatif hal ini menunjukkan bahwa terjadinya surplus anggaran sehingga kelebihan dana tersebut digunakan untuk pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok pinjaman, investasi daerah atau pemberian pinjaman daerah untuk menutup. Sedangkan tahun 2016 bersaldo positif hal ini mengindikasikan adanya masalah keuangan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi misalnya berupa defisit fiskal yang diperlukan instrumen penerimaan pembiayaan daerah untuk menutupnya. Sedangkan tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan arus kas dari aktivitas pembiayaan adalah 0 hal ini menunjukkan adanya masalah keuangan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, bahkan tidak adanya arus kas dari aktivitas pembiayaan sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki arus kas pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok pinjaman, investasi daerah, atau pemberian dana cadangan.

Jadi berdasarkan secara keseluruhan arus kas dari aktivitas pembiayaan dari tahun 2014-2018 dapat dikatakan bersaldo negatif hal ini mengindikasikan adanya masalah keuangan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi misalnya berupa defisit yang besar jumlahnya sehingga memaksa digunakannya sumber pembiayaan internal maupun eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kurang baik.

Dapat dilihat pertumbuhan arus kas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2018 jika digambarkan dalam grafik adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.1**  
**Pertumbuhan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kuantan**  
**Singingi**  
**Tahun 2014 s/d 2018**



#### 4.2.1.2 Arus Kas Bebas

Rumus = Arus Kas bersih aktivitas operasi- arus kas keluar investasi (belanja Modal)

- a. Tahun 2014 = Arus Kas bersih aktivitas operasi- arus kas keluar investasi (belanja Modal)

$$= 385.548.379.856,65 - 358.433.993.474,00$$

$$= \text{Rp. } 27.114.386.382,56$$

- b. Tahun 2015 = Arus Kas bersih aktivitas operasi- arus kas keluar investasi (belanja Modal)

$$= 67.697.801.825,42 - 326.735.746.648,00$$

$$= (\text{Rp.}259.037.944.822,58)$$

- c. Tahun 2016 = Arus Kas bersih aktivitas operasi - arus kas keluar investasi (belanja Modal)

$$= 116.755.934.874,56 - 178.016.363.176,00$$

$$= (\text{Rp. } 61.260.428.301,44)$$

- d. Tahun 2017 = Arus Kas bersih aktivitas operasi - arus kas keluar investasi (belanja Modal)

$$= 183.219.662.461,22 - 192.079.416.609,05$$

$$= (\text{Rp.}8.859.754.147,83)$$

e. Tahun 2018 = Arus Kas bersih aktivitas operasi - arus kas keluar investasi (belanja Modal)

$$= 231.719.121.711,83 - 196.801.855.381,60$$

$$= \text{Rp.}34.917266.330.$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Arus Kas Bebas**  
**Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi**  
**Tahun 2014-2018**

	2014	2015	2016	2017	2018
Arus Kas bersih dari aktivitas Operasi	Rp.385.548.379.856,65	Rp.67.697.801.825,42	Rp.116.755.934.874,56	Rp.183.219.662.461,22	Rp.231.719.121.711,83
Arus keluar kas investasi (belanja Modal)	Rp.358.433.993.474,00	Rp.326.735.746.648,00	Rp.178.016.363.176,00)	Rp.192.079.416.609,05	Rp.196.801.855.381,60
Arus Kas bebas	Rp.27.114.386.382,56	Rp.(259.037.944.822,58)	Rp.(61.260.428.301,44)	Rp.(8.859.754.147,83)	Rp.34.917.266.330,23

*Sumber: data olahan 2020*

Berdasarkan data di atas, Arus kas bebas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2014- 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan. Kenaikan arus kas bebas ini memberikan sinyal positif yang direfleksikan adanya kenaikan arus kas operasi yang dibarengi dengan kenaikan belanja modal. kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Jadi kesimpulan arus kas bebas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan baik.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Analisis Pertumbuhan Arus Kas

Menurut Mahmudi (2016: 194) Analisis pertumbuhan arus kas bermanfaat untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan kas dari masing-masing aktivitas selama beberapa tahun. pertumbuhan arus kas ini dapat digunakan untuk :

- a. Menilai bagus tidaknya fundamental fiskal pemerintah daerah.
- b. Menilai, mengevaluasi, dan memproyeksikan arah kebijakan keuangan daerah
- c. Memperbaiki manajemen arus kas di masa depan.

Cara untuk menentukan pertumbuhan arus kas dari masing-masing aktivitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Analisis pertumbuhan arus kas**

No	Arus kas bersih	Tahun		Pertumbuhan	
		Th.x	Th.-1	Rp.	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/4
1	Aktivitas operasi				
2	Aktivitas Investasi				
3	Aktivitas pembiayaan				
4	Kenaikan (penurunan ) kas				

Sumber: Mahmudi 2016: 194

#### a. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Menurut Mahmudi (2016: 196) Arus kas dari aktivitas operasi merekam perjalanan keluar masuk kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Kas dari operasi mengukur jumlah kas yang dihasilkan dan digunakan oleh pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari dilakukannya aktivitas operasional pemerintah terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Jika arus kas bersih aktivitas operasi bersaldo positif, maka hal ini mengindikasikan bahwa secara internal pemerintah daerah memiliki kemandirian dana yang cukup untuk

membiayai kegiatan perasional rutinnya. Tetapi, apabila arus kas bersih dari aktivitas operasi bersaldo negatif, maka hal ini mengindikasikan diperlukannya suntikan dana dari luar yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan operasi pemerintah daerah. Arus Kas operasi seharusnya bersaldo positif dan jumlahnya pun harus meningkat dari tahun ketahun atau mengalami pertumbuhan yang positif, arus kas operasi yang bersaldo positif mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang baik, bukan justru sebaliknya menurun karena jika negatif maka mengindikasikan adanya kesulitan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2014-2018 dilihat dari setiap Komponen pertumbuhan Arus Kas dari Aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2018 positif kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan dan bersaldo negatif ini mengindikasikan diperlukan suntikan dana dari luar yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan operasi Pemerintah daerah. Dan pada tahun 2016- 2018 Arus Kas operasi mengalami kenaikan ini menunjukkan adanya kesehatan keuangan fiskal yang baik di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Arus kas operasi yang bersaldo positif dan hendaknya juga tumbuh meningkat dari tahun ketahun ini akan memberikan sinyal adanya kinerja keuangan pemerintah yang baik. Sebab diharapkan pertumbuhan arus kas operasi yang positif yang berarti adanya peningkatan dari tahun ketahun, bukan justru malah sebaliknya menurun. Berdasarkan buku Mahmudi hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2014- 2018 adalah baik.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu Yohanes (2014) yang berjudul Analisis Laporan Arus Kas dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang bahwa hasil analisis dari aktivitas operasi, menunjukkan pada tahun 2010 arus kas bersih meningkat sebesar 34,90% dan bersaldo positif. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kemandirian dana yang semakin besar ini mengindikasikan kinerja keuangan baik. Pada tahun 2011 dan 2012 arus kas bersih menurun sebesar 0.76% dan 21,28%, serta bersaldo positif. Penurunan tersebut kurang baik, karena diharapkan jika bersaldo positif adanya peningkatan dari tahun ketahun, bukan malah sebaliknya menurun.

**b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan**

Menurut Mahmudi (2016: 196), arus kas dari aktivitas investasi terkait dengan pengeluaran kas untuk memperoleh aset tetap baru atau penambahan kapasitas aset tetap lama serta penerimaan kas dari penjualan aset tetap lama. Pemerintah daerah melakukan aktivitas investasi untuk menjaga kesinambungan operasional rutin pemerintah daerah saat ini serta untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik di masa depan. Arus kas dari aktivitas investasi bersaldo negatif menunjukkan pemerintah daerah pada tahun bersangkutan telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap yang nilainya besar diandingkan kas yang diperoleh dari kegiatan penghentian atas penjualan aset tetap. Sebaliknya, jika bersaldo positif, maka hal itu mengindikasikan pemerintah daerah tidak melakukan investasi secara agresif, bahkan menunjukkan adanya kecenderungan terjadinya pelepasan aset tetap. Oleh karena itu, saldo negatif (defisit) atas arus kas dari aktivitas investasi ini justru disukai, sedangkan saldo positif diupayakan dihindari karena jika bersaldo positif maka pertumbuhan aset tetapnya akan

bernilai negatif padahal pemerintah daerah diharapkan memiliki pertumbuhan aset tetap yang positif.

Berdasarkan hasil Penelitian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari pertumbuhan Arus Kas dari aktivitas Investasi nonkeuangan tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupten Kuantan Singingi cukup gencar melakukan investasi modal. Namun mengalami penurunan disetiap tahunnya, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Kurang baik.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu Hedi dan Ahmad (2017) yang berjudul Analisis Laporan arus kas Pemerintah Daerah (studi kasus di Pemrintah Kota Madiun) peneliti juga melihat bahwa saldo kas bersih dari aktivitas investasi bersaldo negatif, sehingga ini menunjukkan adanya pertumbuhan aset yang positif di pemerintah kota Madiun.

#### **c. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan**

Menurut Mahmudi (2016: 197) Arus kas dari aktivitas pembiayaan menunjukkan arus kas yang terkait dengan struktur ekuitas pemerintah daerah, yaitu struktur ekuitas dana dan kewajiban. Arus kas dari aktivitas operasi meliputi penerimaan kas yang berasal dari sumber pembiayaan internal maupun eksternal serta pengeluaran kas untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok pinjaman, serta pemberian pinjaman daerah. Penerimaan kas yang bersumber dari pembiayaan internal meliputi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lali (SILPA), penggunaan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pengelolaannya (divestasi dan privatisasi perusahaan daerah), serta penerimaan kembali piutang; sedangkan pembiayaan eksternal berasal dari penerimaan pinjaman. Jika arus kas dari

aktivitas pembiayaan bersaldo positif mengindikasikan adanya masalah keuangan di pemerintah daerah misalnya defisit yang besar jumlahnya sehingga memaksa digunakan sumber pembiayaan internal maupun eksternal. sebaliknya jika arus kas dari pembiayaan bersaldo negatif mengindikasikan adanya kesehatan keuangan daerah yang cukup baik, terjadinya surplus dana cadangan, melakukan investasi aset keuangan daerah dalam bentuk surat berharga serta penyertaan modal, melunasi pinjaman daerah, atau pemberian pinjaman daerah.

Dari hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi arus kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2014-2018 bersaldo positif, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengalami masalah keuangan berupa defisit yang besar jumlahnya sehingga memaksa menggunakan sumber pembiayaan internal maupun eksternal, Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kuantan Singingi kurang baik.

Hasil penelitian terdahulu Hedi dan Ahmad (2017) yang berjudul Analisis Laporan arus kas Pemerintah Daerah (studi kasus di Pemerintah Kota Madiun) bahwa hasil analisis Arus kas dari aktivitas pembiayaan berfluktuasi dari tahun 2012-2016. Tahun 2012 dan 2015 bersaldo negatif, sedang tahun 2013, 2014 dan 2016 bersaldo positif. Arus kas bersaldo negatif menunjukkan bahwa terjadi surplus anggaran, sehingga kelebihan dana tersebut dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal dan pembayaran hutang pokok. Arus kas bersaldo positif menunjukkan bahwa di pemerintah kota Madiun pembiayaan penerimaan daerah lebih besar, yaitu berupa penerimaan kembali pinjaman dibanding dengan pengeluaran pembiayaan.

#### 4.3.2 Arus Kas Bebas

Menurut Mahmudi (2016:197) arus kas bebas adalah arus kas operasi dikurangi pengeluaran kas untuk belanja modal yang terdapat pada aktivitas investasi. Arus kas bebas menunjukkan jumlah uang yang masih tersisa setelah pemerintah daerah menjalankan operasional pokoknya dan melakukan belanja modal dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan dan peningkatan kapasitas pelayanan. Pemerintah daerah yang kinerja keuangannya baik akan memiliki arus kas bebas yang positif yang berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kelebihan kas (surplus) yang dapat digunakan untuk menambah dana cadangan, melunasi utang daerah atau melakukan investasi daerah dalam bentuk penyertaan modal. Semakin besar nilai arus kas bebas, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari arus kas bebas dari tahun 2014-2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan. Kenaikan arus kas bebas ini memberikan sinyal positif yang direfleksikan adanya kenaikan arus kas operasi yang dibarengi dengan kenaikan belanja modal. Kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Jadi kesimpulan arus kas bebas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan baik.

Berdasarkan hasil penelitian Mustofa Arifin (2015) dengan judul penelitian Analisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang (studi kasus Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2009-2013) hasil Kondisi tersebut mengindikasikan pemerintah Kabupaten Lumajang kinerja keuangannya kurang baik.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2014-2018 maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arus Kas dari aktivitas Operasi bersaldo positif Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari Tahun 2014-2018, secara keseluruhan bersaldo positif dan secara konsisten mengalami kenaikan kecuali ditahun 2015 arus kas dari aktivitas operasi menurun dan bersaldo negatif ini mengindikasikan diperlukan suntikan dana dari luar untuk menjaga kesinambungan operasi Pemerintah Daerah. Akan tetapi pada tahun 2016-2018 Arus Kas dari Aktivitas Operasi mengalami kenaikan disetiap tahunnya hal ini menunjukkan ada kesehatan keuangan Pada Pemerintah Kabupaten kuantan Singingi. Jadi dapat disimpulkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2018 adalah baik.
2. Arus Kas dari aktivitas Investasi nonkeuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2014-2018 bersaldo negatif. Pertumbuhan arus kas dari aktivitas investasi tahun 2014 15,34% berarti pemerintah daerah selama tahun tersebut aktif melakukan pembangunan fisik dalam bentuk investasi aset tetap yang ditandai dengan telah terjadinya pengeluaran kas untuk belanja modal yang lebih besar dibandingkan penerimaan kas dari penjualan aset tetap. Pada tahun 2015 pertumbuhan arus kas dari aktivitas investasi sebesar -8,84%, tahun 2016 sebesar 45,52%, tahun 2017 sebesar 7,90% dan tahun 2018 sebesar 2,46%.

3. Berdasarkan hasil diatas dilihat sejak tahun 2014-2018 cukup gencar melakukan invesasi modal. Namun mengalami penurunan disetiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kurang baik.
4. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2014-2018 bersaldo positif ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mengalami masalah keuangan berupa defisit yang besar jumlahnya sehingga memaksa digunakan sumber pembiayaan internal maupun eksternal.jadi kesimpulannya bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Kurang Baik.
5. Hasil penelitian arus kas bebas Pemeritah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2014-2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan. Kenaikan arus kas bebas ini memberikan sinyal positif yang direfleksikan adanya kenaikan arus kas operasi yang dibarengi dengan kenaikan belanja modal. kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Jadi kesimpulan arus kas bebas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan baik.

## **5.2 Saran**

Beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah sebaiknya tetap mempertahankan dan meningkatkan secara konsisten setiap tahunnya untuk Laporan arus Kas dari aktivitas Operasi dengan begitu pemerintah Kabupaten kuantan Singingi

mempunyai jaminan kesinambungan fiskal organisasi dalam jangka panjang yang lebih baik.

2. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlunya, memperhatikan Laporan arus kas dari aktivitas pembiayaan diupayakan untuk di hindari bersaldo positif karena jika bersaldo positif maka pertumbuhan aset tetapnya akan bernilai negatif padahal pemerintah daerah diharapkan memiliki pertumbuhan aset tetap yang positif.
3. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlunya perekrutan pegawai yang memiliki keahlian dibidang akuntansi daerah untuk mengelola Bagian Akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten Kuantan Singingi agar pencatatan dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana dg baik.
4. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu memberikan bimbingan teknis kepada bendara OPD dalam menyusun Laporan Arus agar tidak terjadi kesalahan penginputan dan keterlambatan dalam menyampaikan Laporan Keuangan OPD sehingga proses konsolidasi untuk Penyusunan Laporan Arus Kas Pemeritah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi juga terlambat.
5. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya lebing mengembangkan lagi penelitian yang sudah ada dengan menggunakan analisis-analisis yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Halim, A. dan Syam, M. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta:Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BEFP.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi “Konsep & Tehnik Penyusunan LK*. Jakarta Erlangga.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah: berbasis AkruaI untuk SKPD*. Bandung: Alfabeta.

### Skripsi/ Jurnal :

- Abdi Farza, Muklis 2010. Analisis Laporan Arus Kas Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Kota batu. Skripsi. Universitas Muhamadiyah Malang.
- Al Hajar, Nida’ Asy Syada 2017. Analisis Laporan Arus Kas Untuk menilai Kinerja Keuangan Rumah Sakit XYZ. Skripsi. Politeknik Negeri Lampung.
- Arifin, Mustofa. 2015. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kabupten Lumajang ( studi Kasus Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupten Lumajang Tahun 2009- 2013). Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
- Banggut, Florina. 2013. Analisis Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009- 2011. Skripsi. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

- Batlayeti, Defota. 2017. Analisis Laporan Arus Kas Untuk menilai Kinerja Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah Kabupaten Maluku. *Joernal Riset Mahaiswa Akuntansi (JRMA) ISSN: 2337-5663. Volume: 3, Nomor: 1*
- Karolus, Yohanes. 2014. Analisis Laporan Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang. Skripsi. Univeritas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Kismawati, Alfi. 2017. Analisis Laporan Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Koperasi Wanita Al- Barokah Kec. Soko Kab. Tuban. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Kudhori, Ahmad. 2017. Analisis Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah (studi Kasus di Pemerintah Kota Madiun. *Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume : 11, Nomor : 1, Juli 2017, ISSN 1978-726X*

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupten Kuantan Singingi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

# Lampiran 1 Data Laporan Arus Kas



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	CATATAN	JUMLAH	
			TAHUN 2014	TAHUN 2013
			4	5
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
	<b>ARUS MASUK KAS</b>	5.3.a	1,428,599,001,512,65	1,231,847,803,209,83
5.3.1	Hasil Pajak Daerah	5.3.a	15,603,937,532,16	12,836,121,724,11
5.3.2	Hasil Retribusi Daerah	5.3.a	23,989,838,229,82	12,133,171,324,14
5.3.3	Hasil Penghasilan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.a	4,031,908,931,00	5,243,465,848,00
5.3.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.3.a	18,274,216,410,56	17,997,347,030,38
5.3.5	Dana Bagi Hasil Pajak	5.3.a	27,246,217,416,00	50,605,387,053,20
5.3.6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.3.a	496,992,836,194,00	408,635,834,176,00
5.3.7	Dana Alokasi Umum	5.3.a	618,821,044,000,00	309,206,331,000,00
5.3.8	Dana Alokasi Khusus	5.3.a	12,106,190,000,00	1,541,560,000,00
5.3.9	Dana Ciptamati Khusus	5.3.a	0,00	0,00
5.3.10	Dana Penyesuaian	5.3.a	93,403,958,000,00	75,994,936,000,00
5.3.11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5.3.a	95,621,075,391,71	49,927,948,751,68
5.3.12	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.3.a	0,00	0,00
5.3.13	Pendapatan Hibah	5.3.a	0,00	4,299,607,300,00
5.3.14	Pendapatan Dana Darurat	5.3.a	0,00	0,00
5.3.15	Pendapatan Lainnya	5.3.a	13,138,963,397,50	25,963,851,431,20
5.3.16	<b>ARUS KELUAR KAS</b>	5.3.a	1,043,960,621,656,08	947,047,925,687,75
5.3.17	Belanja Pegawai	5.3.a	616,041,064,947,00	609,446,499,403,00
5.3.18	Belanja Barang	5.3.a	372,352,844,044,00	389,250,335,870,75
5.3.19	Belanja Bangun	5.3.a	0,00	0,00
5.3.20	Belanja Subsidi	5.3.a	0,00	0,00
5.3.21	Belanja Hibah	5.3.a	21,839,837,160,00	23,328,610,000,00
5.3.22	Belanja Bantuan Sosial	5.3.a	6,024,804,000,00	2,410,725,700,00
5.3.23	Belanja Bantuan Keuangan	5.3.a	421,071,516,00	500,994,752,00
5.3.24	Belanja Tidak Tertugas	5.3.a	0,00	1,413,769,960,00
5.3.25	Bayar Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota/Desa	5.3.a	21,281,000,000,00	20,692,000,000,00
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>384,548,379,856,45</b>	<b>284,799,876,516,08</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASSET NONKEWAJIBAN</b>			
	<b>ARUS MASUK KAS</b>	5.3.b	0,00	0,00
5.3.26	Pendapatan Penjualan aset Tanah	5.3.b	0,00	0,00
5.3.27	Pendapatan Penjualan aset Peralatan dan Meubel	5.3.b	0,00	0,00
5.3.28	Pendapatan Penjualan aset Gedung dan Bangunan	5.3.b	0,00	0,00
5.3.29	Pendapatan Penjualan aset Jembatan, Jembatan, dan Jaringan	5.3.b	0,00	0,00
5.3.30	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.3.b	0,00	0,00
5.3.31	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	5.3.b	0,00	0,00
	<b>ARUS KELUAR KAS</b>	5.3.b	358,433,993,474,00	310,518,392,376,00
5.3.32	Belanja Tanah	5.3.b	9,326,191,000,00	9,929,617,300,00
5.3.33	Belanja Peralatan dan Meubel	5.3.b	64,338,889,721,00	53,485,886,990,00
5.3.34	Belanja Gedung dan Bangunan	5.3.b	222,940,896,280,00	75,060,037,476,00
5.3.35	Belanja Jalan, Jembatan, dan Jaringan	5.3.b	161,005,555,009,00	171,521,713,160,00
5.3.36	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.3.b	822,461,464,00	521,117,256,00
5.3.37	Belanja Aset Lainnya	5.3.b	0,00	0,00
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkejawaban</b>		<b>(358,433,993,474,00)</b>	<b>(310,518,392,376,00)</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>	5.3.c		
	<b>ARUS MASUK KAS</b>	5.3.c	93,479,000,00	40,469,025,56
5.3.38	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.3.c	0,00	0,00
5.3.39	Penerimaan Dana Cadangan	5.3.c	0,00	0,00
5.3.40	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.c	0,00	0,00
5.3.41	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.3.c	0,00	0,00
5.3.42	Penerimaan Kembali Pembiayaan Pinjaman Daerah	5.3.c	93,479,000,00	40,469,025,56
5.3.43	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.3.c	0,00	0,00
	<b>ARUS KELUAR KAS</b>	5.3.c	0,00	0,00
5.3.44	Pembentukan Dana Cadangan	5.3.c	0,00	0,00
5.3.45	Pembayaran Modal Pemerintah Daerah	5.3.c	0,00	0,00
5.3.46	Pembayaran Pinjaman Hibah kepada Pihak Ketiga	5.3.c	0,00	0,00
5.3.47	Pembayaran Pinjaman Daerah	5.3.c	0,00	0,00
5.3.48	Pembayaran Utang	5.3.c	0,00	0,00
5.3.49	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berakuran	5.3.c	0,00	0,00
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>		<b>93,479,000,00</b>	<b>40,469,025,56</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

10



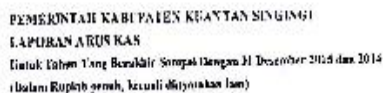


PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 dan 2013  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	CATATAN	JUMLAH	
			TAHUN 2014	TAHUN 2013
1	2	3	4	5
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.3.d		
	ARUS MASUK KAS		55.542.287.558,00	42.394.334.864,00
	Penerimaan Perhitungan Pajak Ketup (PEK)		47.181.988.043,00	37.453.465.769,00
	Penerimaan Penyelesaian Sisa U/P Tahun Lalu		8.360.319.515,00	4.941.369.095,00
	ARUS KELUAR KAS		54.622.862.156,00	36.531.563.947,00
	Pengeluaran Perhitungan Pajak Ketup (PEK)		54.622.862.156,00	36.531.563.947,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran		1.319.425.402,00	5.863.270.917,00
	SENAIKAN PENGURUAN KAS	5.3.e	28.827.510.784,55	(19.814.775.917,26)
	SALDO AWAL KAS DI BUD	5.3.f	326.387.856.395,10	334.755.494.736,46
	SALDO AKHIR KAS DI BUD		355.473.854.347,75	326.387.856.395,10
	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		1.865.255.618,00	9.082.534.050,00
	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		835.760.648,48	416.621.217,00
	SALDO AKHIR KAS	5.3.g	355.994.870.614,23	335.817.021.662,10





5. Lampiran atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini





## PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

## LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014

(Dalam Rupiah seribu, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	CATATAN	Jumlah	
		Tahun 2015	Tahun 2014
ARUS KEUANG KAS	5.5.e	0,00	0,00
Penerimaan Dana Cadangan	5.5.a	0,00	0,00
Penerimaan Modal Pembiayaan Daerah	5.5.c	0,00	0,00
Penerimaan Pinjam Muzakir Pinjam Keluar	5.5.c	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.c	0,00	0,00
Penerimaan Utang	5.5.c	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Anggaran Tahun Berjalan	5.5.c	0,00	0,00
Arus Kas Berada dari Aktivitas Pembiayaan		34.931.000,00	33.479.000,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.d		
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Perimbangan Pinjam Keluar (PFK)		41.189.079.100,00	35.042.207.250,00
Penerimaan Perimbangan Pinjam Keluar (PFK)		40.815.330.328,00	47.541.501.000,00
Penerimaan Perimbangan Pinjam Keluar (PFK)		1.441.543.000,00	8.460.219.215,00
ARUS KELUAR KAS			
Penerimaan Pahlawan Pinjam Keluar (PFK)		39.683.759.148,00	34.022.562.156,00
Penerimaan Pahlawan Pinjam Keluar (PFK)		36.934.181.100,00	31.622.562.156,00
Penerimaan Pahlawan Pinjam Keluar (PFK)		2.719.516.045,00	
Arus Kas Berada dari Aktivitas Non Anggaran		1.774.319.987,00	1.319.645.000,00
REINAIKAN PENGULANGAN KAS	5.5.e	(137.128.692.835,00)	26.827.310.784,00
PENGULANGAN KAS DI BUD DAN PKT	5.5.f	353.473.854.347,75	576.381.866.395,10
PENGULANGAN KAS DI BUD DAN PKT		90.204.161.512,37	423.473.854.347,75
PENGULANGAN KAS DI BENDAHARA PENGULANGAN		3.432.049.652,00	1.453.245.618,50
PENGULANGAN KAS DI BENDAHARA PENGULANGAN		3.219.000,00	853.700.648,49
PENGULANGAN KAS LAINNYA (KOL)		71.091.000,00	9,00
PENGULANGAN KAS	5.5.g	99.757.408.144,37	380.984.870.614,23



BUPATI KUANTAN SINGINGI

Drs. H. MURSI, M.Si





PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
LAPORAN ARUS KAS  
(Untuk Tahun Yang Berakhir Selesai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH	
		TAHUN 2016	TAHUN 2015
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
<b>ARUS MASUK KAS</b>	5.5.a	1.236.792.192.056,56	1.343.415.876.297,22
Hasil Pajak Daerah	5.5.a	20.352.321.291,25	19.178.980.915,87
Hasil Retribusi Daerah	5.5.a	15.118.641.299,45	23.612.950.181,70
Hasil Pengalokasian Zakat yang Dikembalikan	5.5.a	2.608.195.358,50	6.710.708.970,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Lain	5.5.a	23.872.817.979,85	27.368.442.105,41
Dana Jaring Hasil Pajak	5.5.a	32.372.872.140,00	32.271.920.250,00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.a	144.977.267.984,00	226.682.183.201,00
Dana Alokasi Umum	5.5.a	602.865.068.000,00	602.706.223.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.5.a	145.640.014.121,00	20.852.058.000,00
Dana Hibah Khusus	5.5.a	0,00	0,00
Dana Penanaman	5.5.a	135.021.073.600,00	216.555.410.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Provinsi	5.5.a	74.848.135.433,12	71.814.102.268,27
Pendapatan Bagi Hasil Lain-lain	5.5.a	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	5.5.a	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	5.5.a	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	5.5.a	32.359.702.308,00	22.052.910.000,00
<b>ARUS KELUAR KAS</b>	5.5.b	1.110.036.257.182,00	1.178.717.876.471,80
Belanja Pegawai	5.5.b	600.972.178.025,00	705.160.495.025,00
Belanja Barang	5.5.b	219.004.439.096,00	271.137.195.642,30
Belanja Bangun	5.5.b	0,00	0,00
Belanja Sewa	5.5.b	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.5.b	10.350.964.050,00	29.119.021.300,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.b	5.701.630.000,00	5.901.340.102,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.b	188.257.312,30	485.291.264,00
Belanja Tidak Terduga	5.5.b	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota/Desa	5.5.b	102.448.171.891,00	56.996.230.166,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>116.755.934.874,56</b>	<b>164.697.999.825,42</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN</b>			
<b>ARUS MASUK KAS</b>	5.5.c	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan aset Tanah	5.5.c	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan aset Perikanan dan Perikanan	5.5.c	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan aset Gedung dan Bangunan	5.5.c	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan aset Jalan, Jembatan, dan Jembatan	5.5.c	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.c	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	5.5.c	0,00	0,00
<b>ARUS KELUAR KAS</b>	5.5.d	170.016.363.176,00	326.735.746.648,00
Belanja Tanah	5.5.d	0,00	0,00
Belanja Perbaikan dan Perbaikan	5.5.d	33.443.811.995,00	48.906.707.349,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.d	31.333.101.500,00	78.518.544.899,00
Belanja Jalan, Jembatan, dan Jembatan	5.5.d	95.239.254.081,00	191.483.644.300,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.d	0,00	356.250.000,00
Belanja Aset Lainnya	5.5.d	0,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		<b>(170.016.363.176,00)</b>	<b>(326.735.746.648,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>			
<b>ARUS MASUK KAS</b>	5.5.e	188.412.000,00	34.933.000,00
Sisa Lebih Penjualan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.5.e	0,00	0,00
Penerimaan Dana Cadangan	5.5.e	0,00	0,00
Salid Pembiayaan Kalkulasi Daerah yang Dikembalikan	5.5.e	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.e	0,00	0,00
Penerimaan Kredit Pembiayaan Program Daerah	5.5.e	188.412.000,00	34.933.000,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.e	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015  
(Dalam Ringkasan, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	CATATAN	JUMLAH	
			TAHUN 2016	TAHUN 2015
	ARUS KELUAR KAS	5.5.a	0,00	0,00
1	Pembayaran Denda Cidatun	5.5.c	0,00	0,00
2	Pembayaran Admisi Pemerintah Daerah	5.5.c	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Hutang Asuransi Pihak Ketiga	5.5.c	0,00	0,00
4	Pembayaran Utang Daerah	5.5.c	0,00	0,00
5	Pembayaran Lain-lain	5.5.c	0,00	0,00
6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	5.5.c	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		188.412.000,00	34.932.000,00
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.b		
	ARUS MASUK KAS		25.883.484.705,00	41.468.199.130,00
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PTK)		23.059.538.650,00	40.015.140.528,00
2	Penerimaan Pengembalian Sisa UP Tahun Lalu		2.762.757.043,00	1.441.548.602,00
	ARUS KELUAR KAS		31.413.775.581,00	38.683.569.143,00
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PTK)		29.644.151.299,00	36.924.181.705,00
2	Pengeluaran UP Tahun Ini		1.769.624.282,00	2.759.378.543,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		(5.530.290.876,00)	2.784.629.987,00
	KINAIKANYA PENERIMAAN KAS	5.5.a	(66.217.486.177,41)	(227.328.692.835,58)
	SALDO AWAL KAS DI BUKU DAN KETUP	5.5.f	96.245.181.512,17	352.475.814.347,75
	SALDO AKHIR KAS DI BUKU DAN KETUP		29.601.705.134,77	96.245.181.512,17
	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		1.372.618.202,00	1.432.049.632,00
	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGESAHAN		178.803.968,00	3.219.000,00
	SALDO AKHIR KAS LAINNYA		930.671.225,90	73.000.000,00
	SALDO AKHIR KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN		1.490.870.915,00	21.046.573.000,00
	SALDO AKHIR KAS	5.5.g	33.938.669.725,67	39.753.430.144,17

BUPATI Kuantan Singingi

Des. H. MURSINI, M.Si





**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Selesai Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
<b>1.1</b>	<b>ARUS MASUK KAS</b>	<b>5.5.a</b>	<b>1.301.658.302.469,73</b>	<b>1.128.792.192.050,56</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	5.5.a	23.991.302.991,41	20.152.225.211,25
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.5.a	6.040.408.148,65	15.518.653.269,58
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.a	3.938.586.567,00	2.630.172.338,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.a	23.769.255.132,67	23.672.437.099,63
1.1.5	Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.a	31.173.577.856,00	37.572.872.140,00
1.1.6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.5.a	143.297.482.523,00	144.077.267.994,00
1.1.7	Dana Alokasi Umum	5.5.a	600.406.025.000,00	600.665.088.200,00
1.1.8	Dana Alokasi Khusus	5.5.a	187.775.267.614,00	140.640.924.323,00
1.1.9	Dana Otonomi Khusus	5.5.a	0,00	0,00
1.1.10	Dana Penyesuaian	5.5.a	106.211.742.000,00	135.623.773.000,00
1.1.11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5.5.a	74.810.767.870,00	78.645.125.433,12
1.1.12	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.5.a	0,00	0,00
1.1.13	Pendapatan Hibah	5.5.a	0,00	0,00
1.1.14	Pendapatan Dana Utanai	5.5.a	0,00	0,00
1.1.15	Pendapatan Lainnya	5.5.a	40.440.464.756,00	32.369.702.308,00
<b>1.2</b>	<b>ARUS KELUAR KAS</b>	<b>5.5.b</b>	<b>1.118.436.640.808,51</b>	<b>1.116.036.237.182,00</b>
1.2.1	Belanja Pegawai	5.5.b	580.683.509.530,00	690.972.778.925,00
1.2.2	Belanja Barang	5.5.b	267.515.372.800,51	230.908.435.036,00
1.2.3	Belanja Bunga	5.5.b	0,00	0,00
1.2.4	Belanja Subsidi	5.5.b	0,00	0,00
1.2.5	Belanja Hibah	5.5.b	10.265.400.000,00	10.230.964.050,00
1.2.6	Belanja Bantuan Sosial	5.5.b	348.480.000,00	1.737.650.000,00
1.2.7	Belanja Bantuan Keuangan	5.5.b	259.624.377.609,00	638.257.312,00
1.2.8	Belanja Tidak Terduga	5.5.b	0,00	0,00
1.2.9	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota/Desa	5.5.b	0,00	162.448.171.859,00
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>183.221.661.461,22</b>	<b>116.755.954.868,56</b>
<b>2</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN</b>			
<b>2.1</b>	<b>ARUS MASUK KAS</b>	<b>5.5.b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Pendapatan Penjualan atas Tanah	5.5.b	0,00	0,00
2.1.2	Pendapatan Penjualan atas Pemilikan atas Mesin	5.5.b	0,00	0,00
2.1.3	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.b	0,00	0,00
2.1.4	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Jembatan, dan Jaringan	5.5.b	0,00	0,00
2.1.5	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.b	0,00	0,00
2.1.6	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	5.5.b	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>ARUS KELUAR KAS</b>	<b>5.5.b</b>	<b>192.079.416.609,05</b>	<b>178.016.363.176,00</b>
2.2.1	Belanja Tanah	5.5.b	1.282.786.807,60	0,00
2.2.2	Belanja Pemilikan dan Mesin	5.5.b	56.937.563.691,00	53.443.815.595,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.b	40.712.520.531,04	21.233.391.900,00
2.2.4	Belanja Jalan, Jembatan, dan Jaringan	5.5.b	87.927.776.558,00	93.339.154.081,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.b	13.238.769.023,00	0,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	5.5.b	0,00	0,00
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		<b>(192.079.416.609,05)</b>	<b>(178.016.363.176,00)</b>
<b>3</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>	<b>5.5.c</b>		
<b>3.1</b>	<b>ARUS MASUK KAS</b>	<b>5.5.c</b>	<b>0,00</b>	<b>188.412.000,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Penutupan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.5.c	0,00	0,00
3.1.2	Penerimaan Dana Cadangan	5.5.c	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.c	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.c	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kerjasama Pembiayaan Pinjaman Daerah	5.5.c	0,00	188.412.000,00
3.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.c	0,00	0,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam Rupiah pecah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
1	2	3	4	5
3.2	ARUS KIRIM KAS	5.5.e	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.e	0,00	0,00
3.2.2	Penyediaan Modal Pembiayaan Daerah	5.5.e	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pinjaman Hutang kepada Pihak Ketiga	5.5.e	0,00	0,00
3.2.4	Pembayaran Pinjaman Eksternal	5.5.e	0,00	0,00
3.2.5	Pembayaran Utang	5.5.e	0,00	0,00
3.2.6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	5.5.e	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		0,00	(82,412,000,00)
4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.d		
4.1	ARUS MASUK KAS		21.000.002.480,35	23.812.135.708,00
4.1.1	Perolehan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		19.657.384.177,35	21.030.138.662,00
4.1.2	Penerimaan Pengembalian Sisa UP Tahun Lalu		1.372.618.282,00	2.782.997.046,00
4.2	ARUS KELUAR KAS		27.565.169.186,95	31.018.778.580,00
4.2.1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		22.867.907.805,15	29.646.157.299,00
4.2.2	Pengeluaran UP tahun ini		4.702.171.391,80	1.372.618.282,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran		(6.535.166.707,60)	(5.205.436.876,00)
5	KENAIKAN/ PENURUNAN KAS	5.5.e	(15.394.916.885,43)	(66.277.456.177,44)
6	SALDO AWAL KAS	5.5.f	31.320.602.093,73	96.243.161.312,17
7	SALDO AKHIR KAS DI BUD dan BLUD		15.933.761.808,30	29.967.705.334,73
8	SALDO AKTIF KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		4.702.171.391,80	1.372.618.282,00
9	SALDO AKTIF KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		15.348.700,00	176.803.968,00
10	SALDO AKTIF KAS PIKT		233.609.458,60	0,00
11	SALDO AKTIF KAS BOS		256.472.035,00	930.671.225,00
12	SALDO AKTIF KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN		38.782.000,00	1.490.470.915,00
13	SALDO AKHIR KAS	5.5.g	31.275.145.396,50	33.938.969.725,63

BUPATI Kuantan Singingi

Dr. H. MURSINI, M.Si





**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Salah	2018	2017
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.a</b>		
2	<b>ARUS MASUK KAS</b>	<b>5.5.a.1</b>		
3	Hasil Pajak Daerah	5.5.a.1.1	26.605.374.215,08	23.991.306.991,41
4	Hasil Retribusi Daerah	5.5.a.1.2	5.991.154.857,41	6.040.439.138,67
5	Hasil Penghasilan Kebayahan Daerah yang Diizinkan	5.5.a.1.3	3.520.183.86,00	1.938.589.561,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.a.1.4	40.860.151.129,93	23.769.255.132,67
7	Dana Diklat	5.5.a.1.5	34.867.430.216,00	31.173.577.856,00
8	Dana Diklat	5.5.a.1.6	161.759.587.504,00	143.297.883.725,00
9	Dana Diklat	5.5.a.1.7	618.351.583.000,00	600.605.029.000,00
10	Dana Abseki Umum	5.5.a.1.8	204.319.811.402,00	187.775.287.615,00
11	Dana Abseki Khusus	5.5.a.1.9	0,00	0,00
12	Dana Umum Kumpang	5.5.a.1.10	153.079.854.000,00	166.211.742.000,00
13	Dana Pemeliharaan	5.5.a.1.11	75.320.992.210,68	74.810.787.870,00
14	Pendapatan Sisa Hasil Pajak dan Provinsi	5.5.a.1.12	0,00	0,00
15	Pendapatan Bagi Hasil Lain-lain	5.5.a.1.13	42.412.180.000,00	0,00
16	Pendapatan Hibah	5.5.a.1.14	0,00	0,00
17	Pendapatan Dana Darurat	5.5.a.1.15	11.643.540.000,00	40.140.464.746,00
18	Pendapatan Lain-lain	5.5.a.1.16	0,00	0,00
19	Penerimaan dari Perusahaan (Luar Biasa)	5.5.a.1.17	1.379.036.899.036,34	1.301.693.302.469,73
20	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)</b>			
21	<b>ARUS KELUAR KAS</b>	<b>5.5.a.2</b>		
22	Belanja Pegawai	5.5.a.2.1	672.966.184.990,00	560.681.579.539,00
23	Belanja Pegawai	5.5.a.2.2	201.614.846.979,65	267.515.372.800,11
24	Belanja Pegawai	5.5.a.2.3	0,00	0,00
25	Belanja Pegawai	5.5.a.2.4	0,00	0,00
26	Belanja Pegawai	5.5.a.2.5	10.712.016.073,00	10.383.400.000,00
27	Belanja Pegawai	5.5.a.2.6	1.335.000.000,00	346.400.000,00
28	Belanja Pegawai	5.5.a.2.7	392.641.072.770,00	219.624.877.665,00
29	Belanja Pegawai	5.5.a.2.8	27.763.700,00	0,00
30	Belanja Pegawai	5.5.a.2.9	0,00	0,00
31	Belanja Pegawai	5.5.a.2.10	1.147.318.927.318,51	1.118.423.640.098,51
32	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 31)</b>		<b>2.511.719.121.711,85</b>	<b>2.837.219.662.461,22</b>
33	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 31)</b>			
34	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.b</b>		
35	<b>ARUS MASUK KAS</b>	<b>5.5.b.1</b>		
36	Penerimaan dari penjualan aset tetap	5.5.b.1.1	0,00	0,00
37	Penerimaan dari penjualan aset tetap	5.5.b.1.2	0,00	0,00
38	Penerimaan dari penjualan aset tetap	5.5.b.1.3	0,00	0,00
39	Penerimaan dari penjualan aset tetap	5.5.b.1.4	0,00	0,00
40	Penerimaan dari penjualan aset tetap	5.5.b.1.5	0,00	0,00
41	Penerimaan dari penjualan aset tetap	5.5.b.1.6	0,00	0,00
42	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 41)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	<b>ARUS KELUAR KAS</b>	<b>5.5.b.2</b>		
44	Belanja Investasi	5.5.b.2.1	90.015.300,00	1.264.196.207,00
45	Belanja Investasi	5.5.b.2.2	58.747.514.074,00	46.937.561.641,00
46	Belanja Investasi	5.5.b.2.3	56.384.773.572,00	40.712.530.321,00
47	Belanja Investasi	5.5.b.2.4	90.407.667.074,00	67.927.376.528,00
48	Belanja Investasi	5.5.b.2.5	11.171.847.880,00	13.238.769.022,00
49	Belanja Investasi	5.5.b.2.6	0,00	0,00
50	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 49)</b>		<b>196.626.855.326,00</b>	<b>102.679.416.498,00</b>
51	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (42 - 51)</b>		<b>(196.626.855.326,00)</b>	<b>(102.679.416.498,00)</b>
52	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>	<b>5.5.c</b>		
53	<b>ARUS MASUK KAS</b>	<b>5.5.c.1</b>		
54	Sisa Lebih Penjualan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.5.c.1.1	0,00	0,00
55	Penerimaan Dana Cadangan	5.5.c.1.2	0,00	0,00
56	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Diizinkan	5.5.c.1.3	0,00	0,00
57	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.c.1.4	0,00	0,00
58	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.c.1.5	0,00	0,00
59	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.c.1.6	0,00	0,00
60	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (53 s/d 59)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61	<b>ARUS KELUAR KAS</b>	<b>5.5.c.2</b>		
62	Pembayaran Utang Cadangan	5.5.c.2.1	0,00	0,00
63	Pembayaran Utang Cadangan	5.5.c.2.2	0,00	0,00
64	Pembayaran Utang Cadangan	5.5.c.2.3	0,00	0,00
65	Pembayaran Utang Cadangan	5.5.c.2.4	0,00	0,00
66	Pembayaran Utang Cadangan	5.5.c.2.5	0,00	0,00
67	Pembayaran Utang Cadangan	5.5.c.2.6	0,00	0,00
68	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (61 s/d 67)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (60 - 68)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Lampiran 2**  
**Surat Pernyataan Melakukan Surat Riset**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2018	2017
76	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.d		
76	ARUS MASUK KAS	5.5.d.1		
76	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.d.1	22.594.892.541,00	19.657.384.177,35
76	Penerimaan Pengembalian Sisa UP Tahun Lalu	5.5.d.1	4.702.171.391,60	1.372.618.282,00
76	Jumlah Arus Masuk Kas (76 s/d 77)		27.297.063.932,60	21.030.002.459,35
76	ARUS KELUAR KAS	5.5.d.2		
76	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.d.2	22.547.290.710,00	22.862.997.805,35
76	Pengeluaran UP tahun ini	5.5.d.2	200.600,00	4.702.171.391,60
76	Jumlah Arus Keluar Kas (81 s/d 82)		22.547.491.310,00	27.565.169.196,95
76	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (78 - 83)		4.749.572.622,60	(6.535.166.737,60)
83	KENAIKAN / PENURUNAN KAS (32 + 52 + 72 + 84)	5.5.e	39.666.838.952,83	(15.394.920.885,43)
83	SALDO AWAL KAS	5.5.f	16.572.974.004,90	31.328.682.693,73
83	SALDO AKHIR KAS DI BUD (86 + 88)		56.239.812.957,73	15.933.761.808,30
83	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		200.600,00	4.702.171.391,60
83	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		0,00	85.348.700,00
83	SALDO AKHIR KAS FKTP		0,00	258.609.458,60
83	SALDO AKHIR KAS BOS		0,00	256.472.035,00
83	SALDO AKHIR KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN		0,00	38.782.003,00
83	SALDO AKHIR KAS	5.5.g	56.240.013.557,73	21.275.145.396,50



Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini - 10





## PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : [dpmpstpk@kuansing.go.id](mailto:dpmpstpk@kuansing.go.id), Website : <https://dpmpstpk.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

### REKOMENDASI

Nomor : 198/DPMPTSP-PNP/1.04.02.02/2020

0

Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor:456/FIS/UNIK/VI/2020 Tanggal 01 Juli 2020.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **MERDA MINGSIH**  
NIM : **160412022**  
Jurusan : **Akuntansi**  
Fakultas : **FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
Jenjang Pendidikan : **S1**  
Alamat : **TELUK KUANTAN**  
Judul Penelitian : **"Analisis Laporan Arus Kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2014-2018"**  
Untuk melakukan Penelitian di : **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 8 Juli 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Kuantan Singingi,

**MARDANSYAH S.Sos. MM**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP 19750806 200012 1 001







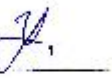
Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan,
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



# KARTU BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : IMERDA NINGSIH  
 NPM : 160412022  
 Pembimbing I : ZUL AMMAR, SE., MM  
 Pembimbing II : YUL EMRI YULIS, SE., M.Si  
 Judul Skripsi : ANALISIS LAPORAN ARLIS KAS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2014-2018.

NO	Tgl/ Bln/ Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	31/02/2020	- Rerisi Judul		
2	12/03/2020	- Sesuaikan Pendataan terdahulu - Metodologi Pendataan		
3	20/04/2020	- Rapihan - Cek daftar pustaka		
4	3/6/2020	- Perbaiki penulisan - Lanjut Pemb II		
5	15/6/2020	Perbaiki segi Sara		
6	30/6/2020	Perbaiki uraian Pemerintah		
7	7/7/2020	Revisi		
8				

Mengetahui



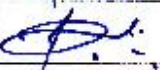




Ketua Program Studi Akuntansi



YUL EMRI YULIS, S.E.M.Si  
 NIDN. 1014038901

# KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : IMERDA NINGSIH  
 NPM : 160412022  
 PEMBIMBING I : ZUL AMMAR, S.E.,MM  
 PEMBIMBING II : YUL EMRI YULIS, S.E., M.Si  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS LAPORAN ARUS KAS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2014-2018

NO	TANGGAL/ BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	5/10/2020	Tambahkan Pembahasan Pendekatan		
2	17/9 - 2020	Kritik masalah di formasi		
3		Penyakit		
4	22/9 - 2020	Apakah laporan - laporan P2		
5	24/9 - 2020	perubahan skema &		
6	29/9 2020	masalah lainnya		
7	30/9 2020	itu		
8				
9				
10				

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



YUL EMRI YULIS, S.E., M.Si  
 NIDN. 1014038901

## BIODATA



### I. Identitas Diri

Nama : Imerda Ningsih  
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Sorik, 04 Desember 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Rumah : Dusun III RT. 003 RW.006  
Desa/Kel. Rawang Oguang  
Kec. Kuantan Hilir Seberang.  
Telepon Rumah dan HP : 0813 6507 5244  
Alamat *Email* : [imerdaningsih54@gmail.com](mailto:imerdaningsih54@gmail.com)

### II. Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal :
  1. Tahun 2006 Lulus SDN 013 Sungai Sorik
  2. Tahun 2009 Lulus SMPN 3 Pulau Kulur
  3. Tahun 2012 Lulus SMKN 3 Teluk Kuantan
- Pendidikan Non Formal : -

### III. Riwayat prestasi

- Prestasi Akademik :
  1. Juara Kelas Peringkat 3 Kelas 3 SDN Sungai Sorik
  2. Juara kelas Peringkat 3 Kelas VII SMPN 3 Pulau Kulur
  3. Juara Kelas Peringkat 2 Kelas VIII SMPN 3 Pulau Kulur
  4. Juara Kelas Peringkat 1 Kelas IX SMPN 3 Pulau Kulur
  5. Juara Kelas Peringkat 1 kelas X SMKN 3 Teluk Kuantan
  6. Juara Kelas Peringkat 2 Kelas XI SMKN 3 Teluk Kuantan
  7. Juara Kelas Peringkat 2 Kelas XII SMKN 3 Teluk Kuantan
- Prestasi Non Akademik :
  1. Juara pembaca terbaik Nomor 1 pada MTQ ke -6 Cabang/Golongan Tartil di Kecamatan Kuantan Hilir tahun 2007

#### **IV . Pengalaman**

- Kerja
  1. Danamon Simpan Pinjam Unit Baserah sebagai Loand Admin, Pree Marketer dari Oktober 2012 S/d Oktober 2014
  2. Kerja di Zona Caffee tahun 2016
  3. Relawan Pajak Sebagai Petugas Asistensi Tahun 2019
  4. Sebagai Anggota PPS Pemilu Tahun 2019

Rawang Oguang, 19 Oktober 2020



**Imerda Ningsih**  
**NPM 160412022**